

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN *E-PARKING*
PADA DINAS PERHUBUNGAN KOTA MEDAN**

SKRIPSI

OLEH

**RYNALDI MUHAMTA S
NPM 208510031**



**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2024**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 19/6/25

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)19/6/25

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN *E-PARKING* PADA DINAS PERHUBUNGAN KOTA MEDAN

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh
Gelar Sarjana Di Fakultas Ilmu Sosial Dan Politik
Universitas Medan Area

OLEH

**RYNALDI MUHAMTA
NPM 208510031**

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2024**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 19/6/25

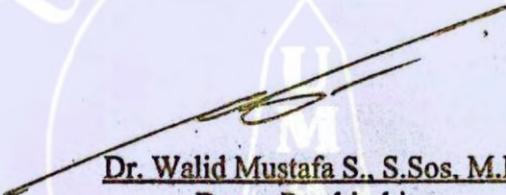
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)19/6/25

LEMBAR PENGESAHAN

NAMA : RYNALDI MUHAMTA
NPM : 208510031
JUDUL : IMPLEMENTASI KEBIJAKAN *E-PARKING*
PADA DINAS PERHUBUNGAN KOTA MEDAN

Disetujui oleh,
Pembimbing



Dr. Walid Mustafa S., S.Sos, M.IP
Dosen Pembimbing

Mengetahui,



Dr. Walid Mustafa S., S.Sos, M.IP
Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu
Politik



Dr. Evi Yunita Kurniaty, S.Sos, M.IP
Ka.Prodi Ilmu Pemerintahan

Tanggal Lulus : 18 Desember 2024

HALAMAN PERNYATAAN

Saya menyatakan bahwa skripsi yang saya susun ini diperlukan untuk mendapatkan gelar sarjana ilmu pemerintahan dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Medan Area. Bagian-bagian tertentu dari tesis saya yang saya rujuk dari berbagai sumber ditulis dengan jelas sesuai dengan standar, prinsip, dan etika penulisan karya ilmiah.

Apabila dikemudian hari ditemukan adanya plagiarisme pada skripsi saya, saya bersedia menerima sanksi berupa pencabutan gelar akademik saya serta sanksi tambahan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Medan, 18 Desember 2024



Rynaldi Muhamta
Npm: 208510031

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR/SKRIPSI UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai civitas akademik Universitas Medan Area, saya yang bertanda tangan bawah ini:

Nama : Rynaldi Muhamta
Npm : 208510031
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Jenis Karya : Tugas akhir/Skripsi/Tesis

Demi kepentingan kemajuan ilmu pengetahuan, setuju untuk memberikan kepada Universitas Medan Area Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty-fee Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul Implementasi Kebijakan *E-parking* Pada Dinas Perhubungan di Kota Medan. Universitas Medan Area mempunyai hak bebas royalti non-eksklusif untuk menyimpan, mentransfer, dan menata media/format dalam bentuk database.

Merawat dan mempublikasikan tugas akhir/Skripsi/Tesis saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik hak cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di Medan,
Pada tanggal, 18 Desember 2024
Yang menyatakan

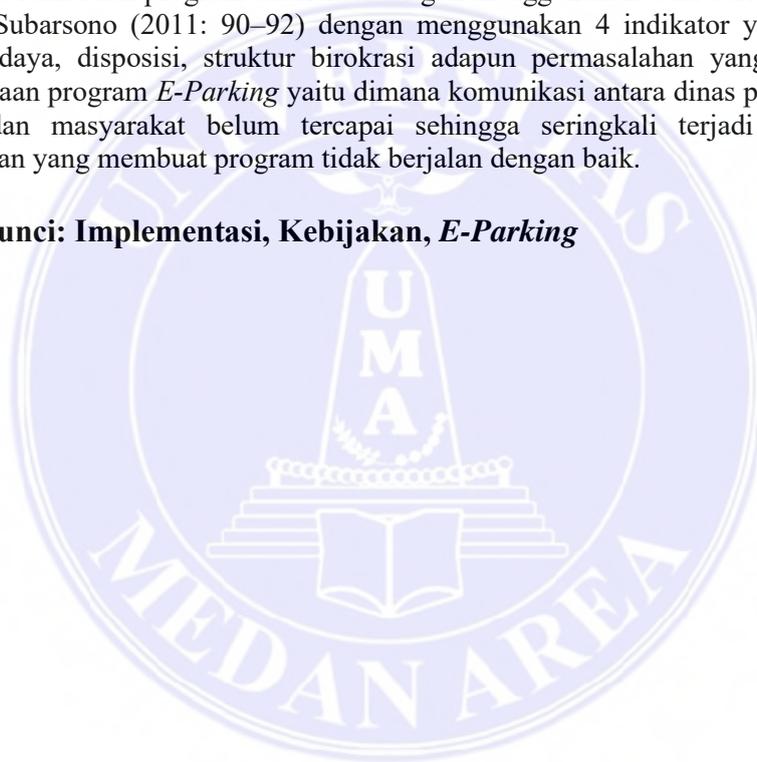


Rynaldi Muhamta
Npm: 208510031

ABSTRAK

Kebijakan *E-Parking* di Kota Medan menggantikan sistem parkir konvensional dengan sistem pembayaran tunai melalui platform elektronik. Menurut Wali Kota Medan, kebijakan ini bertujuan mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan mengurangi kebocoran retribusi parkir di pinggir jalan. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu, Bagaimana Implementasi Kebijakan *E-Parking* Pada Dinas Perhubungan di Kota Medan, serta Apa saja faktor penghambat dalam implementasi kebijakan *E-Parking* pada Dinas Perhubungan Kota Medan penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Implementasi Kebijakan *E-parking* Pada Dinas Perhubungan di Kota Medan. Untuk mengetahui faktor penghambat dalam mengimplementasikan kebijakan pada Dinas Perhubungan Kota Medan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan deskriptif berupa observasi, wawancara dan dokumentasi. Dalam penelitian ini untuk mengukur tingkat keberhasilan program dilakukan dengan menggunakan teori dari Edward III yang dikutip Subarsono (2011: 90–92) dengan menggunakan 4 indikator yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, struktur birokrasi adapun permasalahan yang ditemui dalam pelaksanaan program *E-Parking* yaitu dimana komunikasi antara dinas perhubungan, juru parkir dan masyarakat belum tercapai sehingga seringkali terjadi ketidakcocokan dilapangan yang membuat program tidak berjalan dengan baik.

Kata Kunci: Implementasi, Kebijakan, *E-Parking*



ABSTRACT

The E-Parking policy in Medan City replaced the conventional parking system with a cash payment system through electronic platforms. According to the Mayor of Medan, this policy aimed to optimize Local Own-Source Revenue (PAD) and reduce parking fee leakage on the roadside. The problem formulations in this research were: how was the implementation of the E-Parking policy at the Transportation Agency in Medan City, and what were the inhibiting factors in implementing the E-Parking policy at the Transportation Agency in Medan City. This research aimed to determine the implementation of the E-Parking policy at the Transportation Agency in Medan City and to identify the inhibiting factors in implementing the policy at the Transportation Agency in Medan City. This research used a qualitative descriptive method through observation, interviews, and documentation. To measure the program's success level, this research used Edward III's theory cited by Subarsono (2011: 90-92), which used four indicators: communication, resources, disposition, and bureaucratic structure. The problems found in implementing the E-Parking program were the lack of communication between the transportation agency, parking attendants, and the community, often resulting in field discrepancies that hindered the program's smooth operation.

Keywords: *Implementation, Policy, E-Parking*



RIWAYAT HIDUP

Penulis skripsi ini bernama Rynaldi Muhamta, lahir di Desa Lau pengulu Kecamatan Mardinding Kabupaten Karo pada hari Senin tanggal 05 april 1999. Penulis merupakan anak ke-tiga dari tiga bersaudara dari pasangan Malem Ukur Sembiring dan Pehuliken br Tarigan. Pada tahun 2017, penulis lulus dari SMA pantiharapan lawe desky. Dan pada tahun 2020 Penulis terdaftar sebagai mahasiswa Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Medan Area.

Selama mengikuti perkuliahan, penulis juga mengikuti kelompok mahasiswa. Penulis merupakan anggota aktif Ikatan Mahasiswa Ilmu Pemerintahan (IKAMITA) Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Medan Area, serta organisasi kemahasiswaan internal BEM FISIP UMA (BADAN EKSEKUTIF MAHASISWA).

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat-Nya sehingga dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Implementasi Kebijakan E-Parking Pada Dinas Transportasi Kota Medan”**. Tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk melengkapi kriteria kelulusan Program Studi Ilmu Pemerintahan strata (S-1) Universitas Medan Area, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.

Penulis menyadari bahwa penulisan Proposal ini masih jauh dari kata sempurna, baik dari penyajian maupun tata bahasa untuk itu penulis menerima kritik dan saran yang bersifat membangun untuk kesempurnaan proposal ini. Penulis berharap semoga proposal ini bermanfaat bagi kita semua. Penulis juga tidak lepas dari support dan bantuan, dukungan, serta nasihat dari berbagai orang, baik secara langsung maupun tidak langsung. Demikian dengan penuh kerendahan hati pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada

1. Bapak Prof. Dr. Dadan Ramdan, M.Eng, M.SC selaku Rektor Universitas Medan Area
2. Dr.Walid Musthafa.S.Sos,MIP selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Medan Area beserta Jajaran.
3. Ibu Dr. Novita Wulandari, S.ST, M.Si selaku Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan.
4. Dr.Walid Musthafa.S.Sos,MIP selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan banyak pengarahan serta bimbingan penulisan penyusunan skripsi

ini.

5. Mulkan Andhika Situmorang, M, Pd selaku Dosen Sekretaris yang telah membantu penulis serta memberikan masukan dalam penyusunan skripsi.
6. Seluruh pihak bapak dan ibu dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Medan Area yang telah memberi ilmu, didikan serta memberi arahan kepada penulis selama perkuliahan. Seluruh bapak dan ibu staf kepegawaian administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Politik yang telah membantu pengurusan berkas yang penulis butuhkan.
7. Kepada Kedua Orang Tua yang selalu mendoakan dan memberikan support.
8. Kepada Ridwan Telaumbanua dan Silvester Onekhesi Telaumbanua yang telah bersusah payah dalam membantu dan memberikan dukungan baik secara pikiran, dan tenaga.

Penulis mengharapkan masukan dan kritik yang membangun dari para pembaca agar dapat dilakukan upaya lebih lanjut untuk mengembangkan ide penelitian ini. Penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca baik dalam bidang pendidikan maupun dalam kehidupan sehari-hari.

Medan, 18 Desember 2024



Rynaldi Muhamta
208510031

DAFTAR ISI

| | Halaman |
|---|----------------|
| ABSTRAK | |
| ABSTRACT | |
| RIWAYAT HIDUP | viii |
| KATA PENGANTAR..... | ix |
| DAFTAR GAMBAR..... | xiii |
| DAFTAR TABEL | xiv |
| DAFTAR LAMPIRAN | xv |
| | |
| I. PENDAHULUAN | |
| 1.1 Latar Belakang..... | 1 |
| 1.2 Rumusan Masalah | 5 |
| 1.3 Tujuan Penelitian..... | 5 |
| 1.4 Manfaat Penelitian..... | 5 |
| | |
| II. TINJAUAN PUSTAKA | |
| 2.1 Kebijakan Publik | 7 |
| 2.2 Implementasi | 9 |
| 2.3 Definisi Implementasi Kebijakan | 12 |
| 2.4 Parkir | 16 |
| 2.4.1 Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum..... | 18 |
| 2.4.2 Subjek dan Objek Retribusi Parkir..... | 18 |
| 2.4.3 Kebutuhan Parkir..... | 19 |
| 2.4.4 Jenis-jenis Parkir | 20 |
| 2.4.5 Pengendalian Parkir..... | 22 |
| 2.5 <i>E-parking</i> | 23 |
| 2.5.1 Defenisi <i>E-Parking</i> | 23 |
| 2.5.2 Manfaat Implementasi <i>E-parking</i> | 24 |
| 2.6 Penelitian Terdahulu..... | 25 |
| 2.7 Kerangka Berpikir | 28 |
| | |
| III. METODE PENELITIAN | |
| 3.1 Jenis Penelitian | 29 |
| 3.2 Informan Penelitian | 31 |
| 3.3 Teknik Pengumpulan Data | 32 |
| 3.3.1 Observasi | 32 |
| 3.3.2 Observasi Partisipatif..... | 33 |
| 3.3.3 Wawancara | 33 |
| 3.4 Teknik Analisis Data | 33 |
| 3.5 Lokasi dan Waktu Penelitian..... | 34 |
| | |
| IV. HASIL DAN PEMBAHASAN | |
| 4.1 Hasil..... | 36 |
| 4.1.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian | 36 |
| 4.1.2 Visi Misi Dinas Perhubungan Kota Medan..... | 37 |

| | |
|--|----|
| 4.1.3 Struktur Organisasi Dinas Perhubungan Kota Medan..... | 39 |
| 4.2 Pembahasan | 48 |
| 4.2.1 Implementasi Kebijakan <i>E-parking</i> Pada Dinas Perhubungan Kota Medan..... | 48 |
| 4.2.2 Faktor Penghambat Implentasi Kebijakan <i>E-parking</i> Pada Dinas Perhubungan Kota Medan..... | 68 |
| V. KESIMPULAN DAN SARAN | |
| 5.1 Kesimpulan..... | 71 |
| 5.2 Saran | 72 |
| DAFTAR PUSTAKA | 73 |
| LAMPIRAN..... | 75 |



DAFTAR GAMBAR

| | Halaman |
|--|----------------|
| 1. Kerangka Berpikir | 28 |
| 2. Kantor Dinas Perhubungan Kota Medan | 37 |
| 3. Stuktur Organisasi Dinas Perhubungan Kota Medan | 39 |



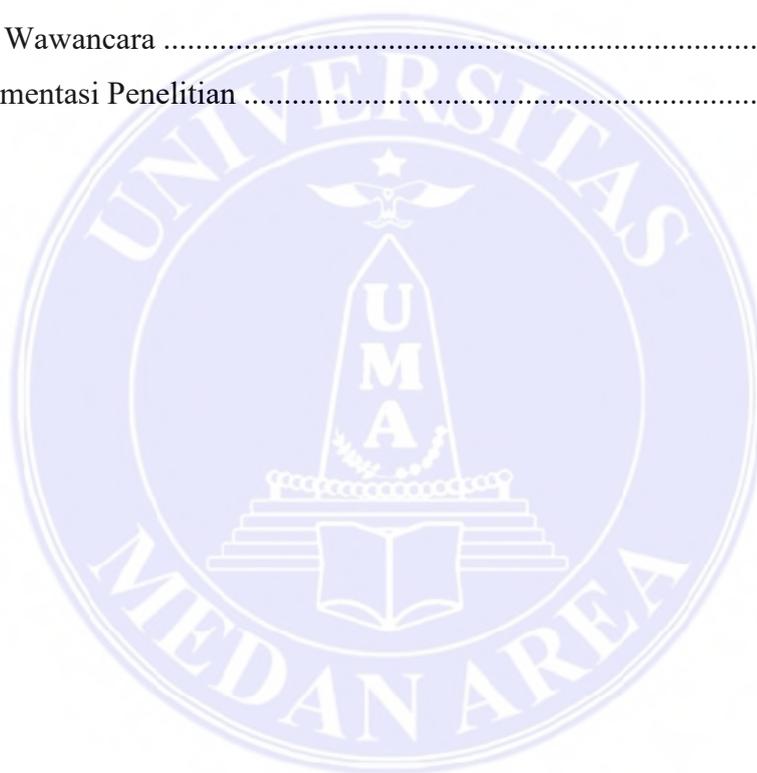
DAFTAR TABEL

| | Halaman |
|--|----------------|
| 1. Penelitian Terdahulu | 25 |
| 2. Informan Penelitian..... | 32 |
| 3. Rincian Jadwal Penyelesaian Skripsi | 35 |
| 4. Lokasi Jalan Penerapan <i>E-Parking</i> Parkir Kota Medan | 50 |



DAFTAR LAMPIRAN

| | Halaman |
|---|----------------|
| 1. Pedoman Observasi | 75 |
| 2. Pedoman Wawancara | 76 |
| 3. Surat Pengantar Riset | 77 |
| 4. Surat Pengantar Riset dari BRIDA | 78 |
| 5. Surat Selesai Riset..... | 79 |
| 6. Hasil Observai | 80 |
| 7. Hasil Wawancara | 81 |
| 8. Dokumentasi Penelitian | 91 |



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Negara Indonesia merupakan negara kepulauan yang didalamnya terdapat berbagai macam suku dan budaya. Dengan wilayah yang sedemikian luas dan diikuti jumlah penduduk yang besar, tentu sangat sulit bagi pemerintah untuk mengatur masyarakatnya yang menyebar di berbagai wilayah. Maka dari itu disaat pemerintahan orde baru dimulai, negara Indonesia menganut sistem pemerintahan sentralistik yang diharapkan mampu mengatasi berbagai permasalahan.

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), Kota Medan, ibu kota Provinsi Sumatera Utara, memiliki jumlah penduduk yang cukup besar—2.460.858 jiwa pada tahun ini. Lahan atau tempat parkir tidak mencukupi karena meningkatnya jumlah penduduk dan pembangunan fasilitas umum seperti pusat perbelanjaan, taman, dan taman hiburan.

Seiring dengan berkembangnya zaman sistem sentralistik yang dulu diterapkan di Indonesia telah muncul berbagai masalah, seperti peraturan yang dibuat oleh pemerintah pusat dan berlaku untuk semua daerah di Indonesia yang membuat tidak sesuai dengan kondisi masing-masing daerahnya. Sehingga dalam menangani setiap permasalahan pemerintah tidak dapat secara cepat dan tepat, pemerintah juga dinilai kurang bisa tanggap dalam mengambil kebijakan yang berkaitan dengan rumah tangga suatu daerah.

Karena banyak warga Medan yang lebih untuk menggunakan kendaraan pribadi dibandingkan angkutan umum, maka lahan parkir menjadi prioritas utama

bagi mereka yang memiliki mobil atau kendaraan bermotor. Dampaknya, daya beli masyarakat terhadap kendaraan meningkat setiap tahunnya karena adanya kemudahan dalam memiliki kendaraan pribadi, seperti tersedianya mobil dan sepeda motor dengan kebutuhan yang sederhana. Akibatnya, tidak tersedia cukup tempat parkir.

Di Kota Medan, kebijakan *E-Parking* adalah salah satu kebijakan yang baru. Kebijakan ini menggantikan sistem parkir tunai dengan sistem parkir tradisional, yang seringkali dibayar di tempat. Tujuan dari aturan tersebut, menurut Wali Kota Medan Bobby Nasution, adalah memaksimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari retribusi parkir pinggir jalan yang dituding banyak bocor.

Salah satu inovasi yang digunakan Pemerintah Kota Medan untuk mengatasi permasalahan ketidakstabilan parkir di kota tersebut adalah *e-parking*. Untuk meningkatkan keselamatan masyarakat dan mengurangi maraknya parkir liar di Kota Medan, telah diberlakukan Peraturan Wali Kota Medan Nomor 45 Tahun 2021 tentang E-Parking. Adanya kebijakan tersebut merupakan upaya untuk mengurangi jumlah juru parkir liar yang sering melakukan pungutan liar.

Bagi pemerintah kota, parkir elektronik (*E-Parking*) merupakan salah satu cara untuk menangani biaya parkir. Dengan beragam fitur, fasilitas, dan modul pada aplikasi e-parking online, layanan e-parking merupakan penemuan terbaru untuk mengatasi sejumlah permasalahan pengelolaan parkir pada pemerintah daerah. Menurut Artamlia dan Prabawati (2019), e-parking merupakan tujuan pemerintah dalam memanfaatkan teknologi mutakhir untuk melayani masyarakat guna mewujudkan smart city. Pemerintah Kota Medan menjamin seluruh parkir di Kota Medan, termasuk parkir pinggir jalan, akan langsung menerapkan sistem transaksi

non tunai atau e-parking di setiap sudut jalan di Kota Medan melalui Peraturan Wali Kota Medan Nomor 45 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Pelayanan Publik. Parkir.

Pada tahun 2020, terealisasi sebesar Rp14,11 miliar atau 82,15% dari keseluruhan target sebesar Rp17,18 miliar dari retribusi parkir kota Medan. Sebaliknya, pendapatan retribusi parkir sebesar Rp 26,56 miliar pada tahun 2019; Namun angka tersebut turun signifikan pada tahun 2020. Hanya Rp12,98 miliar atau 58,72% dari target Rp22,1 miliar yang terealisasi dari retribusi parkir pada tahun 2020. Dibandingkan tahun 2019, ketika pendapatan riil mencapai Rp21,99 miliar, pendapatan turun sebesar Rp9 miliar. Hal ini sangat kontras dengan peningkatan jumlah mobil setiap tahunnya.

Hal tersebut saat ini dilakukan oleh Pemerintah Kota Medan yang bertindak melalui Walikota Medan. Terdapat 22 tempat parkir di Medan yang dilengkapi mesin parkir elektronik (*E-Parking*). Tampaknya setelah masa uji coba selama 24 hari, penerapan program *e-parking* bisa mendongkrak Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebanyak 150 persen. Penerapan E-Parking merupakan pendekatan teknologi digital yang bertujuan untuk mengoptimalkan potensi penerimaan pajak parkir daerah. Namun, hingga saat ini, *E-Parking* masih diyakini belum sepenuhnya diterapkan pada ruas jalan yang ditentukan, dan dua praktik parkir cara manual dan E-Parking masih dilakukan. Hal ini disinyalir karena kurangnya kesadaran dan pelatihan mengenai program tersebut.

Dengan adanya *E-Parking* diharapkan dapat meningkatkan kenyamanan dan keamanan, menciptakan tempat parkir yang terorganisir dengan baik, dan memberikan pelayanan yang lebih efektif dan efisien kepada masyarakat. Selain

itu, pembayaran parkir akan lebih transparan sehingga memudahkan pihak-pihak terkait untuk mengawasi dan mempelajari lebih lanjut. informasi tentang setiap transaksi pembayaran *E-Parking* dan pendapatan retribusi daerah. Karena *e-parking* merupakan layanan publik yang dikembangkan pemerintah untuk masyarakat, maka sasaran utamanya adalah masyarakat umum sebagai pelanggan (Dewi, Silvanda & Utomo 2021).

Oleh karena itu, kepercayaan, masukan, dan gagasan masyarakat sangat penting untuk perbaikan penerapan E-Parking di masa depan dan meningkatkan kesadaran akan perlunya penggunaan parkir berbasis elektronik (*E-Parking*). Sikap pengguna merupakan reaksi terhadap suatu item yang akan diterima atau ditolak di kemudian hari. Hal inilah yang menginspirasi penulis untuk menulis tentang bagaimana reaksi masyarakat terhadap diperkenalkannya e-parking di Kota Medan.

Berdasarkan dari uraian diatas, dalam penelitian ini dibuat dengan judul **“implementasi kebijakan E-Parking pada dinas perhubungan Kota Medan.”**

1.2 Rumusan Masalah

Merujuk dari latar belakang masalah yang sudah di bahas diatas, ada hal menarik yang dapat dibahas lebih lanjut, adapun rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana Implementasi Kebijakan *E-Parking* Pada Dinas Perhubungan di Kota Medan ?
2. Apa saja faktor penghambat dalam implementasi kebijakan *E-Parking* pada Dinas Perhubungan Kota Medan?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan Implementasi Kebijakan *E-parking* Pada Dinas Perhubungan di Kota Medan.
2. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan faktor penghambat Implementasi Kebijakan *E-parking* Pada Dinas Perhubungan di Kota Medan.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian diharapkan dapat bermanfaat bagi berbagai pihak. Adapun manfaat penelitian ini sebagai berikut;

a. Manfaat Teoritis

1. untuk membantu penulis mengasah kemampuan berdasarkan kajian Ilmu Pemerintahan khususnya yang berkaitan dengan implementasi Kebijakan E-Parking Dinas Perhubungan Kota Medan.
2. Menjadi sumber informasi langsung bagi Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Medan Area.
3. Membantu penulis dan peneliti lain, khususnya mahasiswa ilmu pemerintahan, meningkatkan keterampilan ilmiahnya secara metodis dan sistematis.

b. Manfaat Praktis

1. Penelitian ini diharapkan dapat memperluas pengalaman praktis dalam bidang pengetahuan tentang penerapan kebijakan e-parking oleh Dinas Perhubungan Kota Medan.
2. Penelitian ini diharapkan dapat membantu memberikan masukan kepada pemerintah Kota Medan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Kebijakan Publik

Secara umum kebijakan adalah suatu keputusan yang diambil dengan maksud untuk menyelesaikan permasalahan tertentu atau melaksanakan tindakan tertentu dengan tujuan yang jelas dan tertentu. Menurut Mustopadidjaja dalam Tahir (2014:21), istilah “kebijakan” sering digunakan untuk menggambarkan penyelenggaraan negara dan penyelenggaraan pemerintahan secara umum. Biasanya, kebijakan-kebijakan ini diberlakukan dan dinyatakan dalam berbagai aturan. Baik dalam konteks pengelolaan sumber daya, pelayanan publik, atau pembangunan, peraturan ini menunjukkan langkah-langkah dan kegiatan yang telah diambil pemerintah untuk mencapai tujuan tertentu. Dengan demikian, kebijakan merupakan panduan bagi pemerintah dalam bertindak dan membuat keputusan yang berpengaruh terhadap kehidupan masyarakat luas.

Menurut Anderson dalam Tahir (2014:12), kebijakan adalah suatu kegiatan dengan tujuan tertentu yang dilakukan oleh satu atau lebih aktor untuk menyelesaikan suatu permasalahan. Dalam konteks ini, kebijakan tidak hanya merupakan sekadar rencana atau ide, melainkan juga mencakup langkah konkret yang diambil untuk mencapai hasil yang diinginkan. Para pelaku yang terlibat bisa beragam, mulai dari individu hingga kelompok, yang semuanya bekerja sama untuk menemukan solusi yang efektif terhadap isu yang dihadapi. Kebijakan ini bertujuan untuk memberikan arah dan panduan dalam menangani masalah sehingga dapat dicapai perubahan atau perbaikan yang

diharapkan.

Menurut Crinson dalam Ayuningtyas (2014: 8), kebijakan merupakan sebuah konsep dan bukan sesuatu yang partikular atau nyata, oleh karena itu pendefinisianya seringkali menghadapi beberapa tantangan. Crinson mengatakan bahwa jika kebijakan dipandang sebagai serangkaian keputusan yang terkait atau sebagai arah tindakan, maka akan jauh lebih bermanfaat.

Sementara Menurut Fredrich dalam Agustino (2017:166), kebijakan adalah serangkaian tindakan atau inisiatif yang dilakukan oleh orang, organisasi, atau pemerintah dalam situasi tertentu yang dihadapkan pada berbagai kemungkinan dan tantangan. Kebijakan ini bertujuan untuk mencapai tujuan yang diharapkan dengan mengatasi hambatan dan memanfaatkan peluang yang ada. Selanjutnya Menurut Anderson dalam Agustino (2017: 17), menegaskan bahwa kebijakan publik adalah rangkaian tindakan yang direncanakan untuk mencapai tujuan tertentu, yang dilakukan oleh individu atau kelompok orang yang terlibat dalam isu atau hal tertentu yang sedang dipertimbangkan.

Dari penjelasan di atas sehingga dapat disimpulkan bahwa Kebijakan publik merupakan serangkaian tindakan yang dilakukan oleh pemerintah untuk menyelesaikan permasalahan publik dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Kebijakan publik dalam hal ini dapat berupa undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan presiden, atau aturan lainnya yang ditetapkan oleh pemerintah. Tujuan utama dari kebijakan publik adalah untuk memperbaiki kondisi sosial, ekonomi, dan lingkungan dalam suatu negara atau wilayah.

2.2 Implementasi

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, istilah Implementasi mempunyai arti pelaksanaan atau penerapan. Implementasi sering kali mengacu pada langkah-langkah yang dilakukan untuk mencapai tujuan tertentu. beberapa kata kunci yang digunakan untuk mengartikan implementasi menurut Pressman dan Wildavsky melaksanakan kebijakan (*to carry out*), memenuhi janji-janji dalam dokumen kebijakan (*to fill*), menghasilkan output sesuai tujuan kebijakan (*to produce*) dan menyelesaikan misi yang perlu diwujudkan dalam tujuan kebijakan (Purwanto, 2015:20).

Implementasi merupakan proses pelaksanaan atau penerapan suatu rencana atau kebijakan yang telah disusun dengan matang dan terperinci. Ini adalah langkah penting dalam siklus kebijakan publik yang bertujuan untuk merealisasikan keputusan-keputusan yang telah dibuat menjadi tindakan nyata yang berdampak pada masyarakat. Dalam konteks ini, beberapa ahli telah memberikan definisi dan pandangan yang memperkaya pemahaman kita tentang konsep implementasi.

Menurut Agus Subianto (2020:70), tahap implementasi kadang disebut studi implementasi, bertujuan untuk mengetahui variabel-variabel yang mempengaruhi berhasil atau tidaknya proses implementasi kebijakan. Studi implementasi ini penting karena membantu memahami elemen- elemen kunci yang menentukan suatu kebijakan dapat berjalan dengan baik atau tidak. Dengan kata lain, analisis pada tahap ini memberikan wawasan tentang apa yang perlu diperbaiki atau diperkuat untuk memastikan bahwa tujuan kebijakan dapat tercapai.

Menurut Yulianto Kadji (2015:14), implementasi mencakup sistem insentif, penghargaan, dan hukuman (*re-punishment*) untuk menjamin keberhasilan

implementasi suatu kebijakan. Sistem insentif ini bertujuan untuk mendorong pelaksana kebijakan untuk bekerja sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Penghargaan diberikan sebagai bentuk apresiasi atas kinerja yang baik, sementara sanksi dikenakan untuk mencegah dan mengatasi pelanggaran atau ketidakpatuhan terhadap kebijakan. Dengan adanya sistem ini, implementasi kebijakan diharapkan dapat lebih efektif dan efisien, menghasilkan kinerja yang optimal, dan memberikan dampak positif bagi masyarakat.

Grindle (dalam Mulyadi, 2015:47) mengartikan implementasi sebagai suatu proses tindakan administratif komprehensif yang dapat dievaluasi pada tingkat program. Kegiatan ini bertujuan untuk mencapai perubahan yang diinginkan, tidak peduli seberapa besar atau kecilnya, dan mengubah keputusan tersebut menjadi pola operasional. Pandangan ini menekankan bahwa implementasi tidak hanya sekadar menjalankan apa yang telah direncanakan, tetapi juga melibatkan penyesuaian dan pengaturan operasional agar tujuan kebijakan dapat tercapai secara efektif. Implementasi juga mencakup evaluasi terhadap kinerja dan dampak kebijakan, yang kemudian menjadi dasar untuk penyusunan kebijakan baru di masa depan.

Majone dan Wildavsky melihat implementasi secara sederhana sebagai pelaksanaan atau penerapan. Dalam pandangan mereka, implementasi adalah langkah konkret di mana keputusan kebijakan diubah menjadi tindakan nyata yang dapat diukur dan dinilai keberhasilannya. Leo Agustino (2014) menegaskan bahwa implementasi adalah suatu proses dinamis dimana pelaksana kebijakan terlibat dalam sejumlah kegiatan dengan tujuan akhir mencapai suatu hasil yang selaras dengan tujuan kebijakan.

Subarsono (2011) mengemukakan bahwa Implementasi adalah suatu

kegiatan yang berhubungan dengan penyelesaian suatu pekerjaan dengan menggunakan alat-alat untuk mendapatkan hasil yang diinginkan. dalam konteks kebijakan implementasi adalah kegiatan yang berkaitan dengan penyelesaian atau aktivitas untuk mencapai kebijakan yang sudah dibuat. Ini adalah tahapan penting dalam merealisasikan suatu kebijakan yang sudah direncanakan, karena tanpa implementasi, kebijakan hanya akan menjadi dokumen tanpa dampak nyata.

Secara keseluruhan, implementasi kebijakan melibatkan serangkaian langkah yang dirancang untuk memastikan bahwa keputusan kebijakan dapat dijalankan secara efektif dan efisien. Proses ini mencakup perencanaan operasional, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi. Implementasi juga memerlukan koordinasi antar berbagai pihak yang terlibat, baik dari sektor pemerintah maupun masyarakat. Dalam tahap ini, penting untuk memastikan bahwa semua sumber daya yang diperlukan tersedia dan digunakan secara optimal.

Dengan demikian, implementasi adalah proses kompleks yang memerlukan perhatian terhadap berbagai aspek, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi. Keberhasilan implementasi kebijakan sangat tergantung pada kemampuan untuk mengatasi hambatan-hambatan yang muncul dan melakukan penyesuaian yang diperlukan berdasarkan evaluasi dan umpan balik. Oleh karena itu, sangat penting bagi para pengambil kebijakan dan pelaksana di lapangan untuk memiliki kesadaran menyeluruh mengenai proses implementasi dan elemen-elemen yang mempengaruhinya.

2.3 Definisi Impementasi Kebijakan

Proses untuk memastikan bahwa suatu kebijakan dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan disebut implementasi kebijakan. Implementasi kebijakan

publik menurut Makmur dan Thahier (dalam Setyawan, 2017) adalah suatu proses yang menggabungkan kognisi dan tindakan manusia untuk memberikan ketertiban dalam pelaksanaan tanggung jawab negara atau pemerintah. Dengan perencanaan yang matang, logis, efisien dan sukses, proses ini dilaksanakan untuk mewujudkan kesejahteraan bersama yang berlandaskan nilai-nilai keadilan dan kesetaraan.

Dalam pelaksanaan kebijakan, terdapat berbagai unsur yang harus bekerja sama untuk mewujudkan tujuan yang telah ditetapkan. Implementasi kebijakan merupakan tindakan nyata pemerintah untuk mencapai target yang telah dirumuskan dalam keputusan kebijakan. Namun, sebelum kebijakan diimplementasikan, penting bagi pemerintah untuk melakukan kajian mendalam agar kebijakan tersebut tidak menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat. Langkah ini bertujuan agar kebijakan yang dihasilkan tidak bertentangan dengan kepentingan masyarakat dan tidak merugikan pihak manapun.

Wibawa (dalam Tahir, 2014) menekankan bahwa tujuan implementasi kebijakan adalah memberikan arah yang memungkinkan tindakan pemerintah mencapai tujuan kebijakan politik. Jika maksud dan tujuan umum telah dijelaskan dengan baik, program telah direncanakan dengan matang, dan pendanaan telah dialokasikan untuk membantu pencapaian tujuan dan sasaran tersebut, maka proses pembuatan kebijakan baru dapat dimulai.

Penerapan kebijakan juga memerlukan upaya para pembuat kebijakan untuk mempengaruhi apa yang disebut Lipsky sebagai “birokrat tingkat jalanan,” atau mereka yang terlibat dalam pemberian layanan atau regulasi perilaku kelompok sasaran. Misalnya, strategi pembangunan infrastruktur publik yang berupaya meningkatkan kualitas hidup masyarakat merupakan contoh kebijakan dasar yang

dilaksanakan oleh satu entitas. Namun sejumlah organisasi, termasuk birokrasi pemerintah kabupaten, kecamatan, dan desa, akan dilibatkan dalam pelaksanaan kebijakan makro, seperti kebijakan yang bertujuan untuk mengurangi kemiskinan di daerah pedesaan.

Merilee S. Grindle menegaskan bahwa proses penerapan kebijakan melibatkan interaksi dengan jaringan kekuatan politik, ekonomi, dan sosial yang berpotensi memberikan dampak positif atau negatif terhadap tujuan kebijakan selain perilaku pelaksana kebijakan ketika berbicara dengan kelompok sasaran.

Secara teknis, Bowman (dalam Aslinda & Ibrahim, 2018) menyatakan bahwa implementasi kebijakan menempatkan berbagai tujuan dari *policy adopters* untuk mencapai hasil yang diinginkan melalui tindakan dan usaha tertentu. Tujuan-tujuan ini kemudian dijadikan acuan dalam pengambilan keputusan selama proses pelaksanaan kebijakan. Hal ini sejalan dengan pendapat Hill dan Hupe (dalam Aslinda & Ibrahim, 2018) yang menyebutkan bahwa dalam proses implementasi terdapat sub-proses pembuatan kebijakan, sehingga kebijakan akan terus berkembang dan disesuaikan selama tahap implementasi berlangsung.

Kejelasan pesan yang disampaikan pembuat kebijakan kepada pelaksana menentukan keberhasilan implementasi kebijakan, menurut Merilee S. Grindle dkk. (Tahir, 2014:75). Jika kita menganggap kebijakan sebagai sebuah komunikasi, maka bentuk pesan, substansi, dan reputasi komunikator pada akhirnya menentukan seberapa mudah kebijakan tersebut diimplementasikan.

Menurut Edward III yang dikutip Subarsono (2011: 90–92), beberapa faktor utama yang mempengaruhi bagaimana kebijakan diimplementasikan:

a. Komunikasi, Implementasi kebijakan yang efektif memerlukan komunikasi

yang jelas antara kelompok sasaran dan pelaksana mengenai maksud dan tujuan kebijakan, Hal ini akan mengurangi distorsi implementasi.

- b. Sumber Daya, Meskipun isi kebijakan sudah jelas dan konsisten, implementasi kebijakan tidak akan berhasil jika pelaksana kebijakan belum memiliki sumber daya manusia (seperti keahlian pelaksana).
- c. Disposisi, Sifat dan kepribadian pelaksana, termasuk dedikasi, integritas, dan pandangan demokratisnya. Tindakan yang diinginkan pembuat kebijakan dalam implementasi kebijakan dapat diikuti jika pelaksananya berperilaku baik. Akan tetapi jika terdapat perbedaan sikap atau perspektif antara implementor dan pembuat kebijakan, sehingga proses implementasi juga akan tidak efektif.
- d. Struktur Birokrasi: Faktor utama adalah struktur organisasi yang bertanggung jawab melaksanakan kebijakan. Prosedur Operasi Standar (SOP) dan fragmentasi merupakan aspek struktur organisasi. Struktur organisasi yang terlalu luas cenderung membuat operasional organisasi menjadi kaku dengan melemahkan pengawasan dan menciptakan proses birokrasi yang berbelit-belit (birokrasi).

Van Matter & Van Horn (dalam Nugroho, 2014:628) menegaskan bahwa pelaksanaan kebijakan memerlukan bantuan sumber daya manusia, material, dan metode. Dari ketiga sumber daya tersebut, sumber daya manusia merupakan sumber daya yang paling krusial karena keduanya merupakan objek sekaligus subyek pelaksanaan kebijakan. Edwards juga menekankan dua ciri utama struktur birokrasi: fragmentasi dan Prosedur Operasi Standar (SOP). SOP dibuat secara internal sebagai respons terhadap keterbatasan waktu dan sumber daya yang dihadapi oleh pelaksana dan kebutuhan akan konsistensi dalam organisasi yang

besar dan rumit.

Sebaliknya, kekuatan eksternal termasuk komite legislatif, kelompok kepentingan, pejabat eksekutif, konstitusi negara, dan jenis kebijakan yang berdampak pada pengorganisasian birokrasi pemerintah menyebabkan fragmentasi birokrasi. Kombinasi kedua karakteristik ini menggambarkan bagaimana birokrasi berusaha mengelola sumber daya dan menetapkan prosedur standar, sambil menghadapi tekanan dan tuntutan dari berbagai pemangku kepentingan eksternal.

Oleh karena Dalam penelitian mengenai implementasi kebijakan dianalisis menggunakan teori dari Edward III, yang dijelaskan secara rinci oleh Subarsono (2011: 90–92), menerangkan beberapa faktor utama yang secara signifikan mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan. Faktor-faktor tersebut meliputi komunikasi yang efektif antara pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan, sumber daya yang memadai untuk mendukung proses implementasi, disposisi atau sikap para pelaksana kebijakan terhadap kebijakan yang sedang dijalankan, serta struktur birokrasi yang ada

2.4 Parkir

Parkir merupakan yang termasuk dalam ruang publik yang sudah ada keberadaannya. Individu atau kelompok biasanya menuju ke tempat tujuan dan setelah sampai kendaraan ditinggali oleh pemiliknya atau parkir sebentar. Parkir adalah keadaan sementara kendaraan tidak bergerak, sedangkan berhenti adalah keadaan sementara kendaraan tidak bergerak dengan pengemudi berada di dalam kendaraan, menurut Direktur Jenderal Perhubungan Darat (1996). Bagi pemilik mobil, parkir adalah hal yang penting, dan mereka ingin memarkir mobilnya di lokasi yang aman dan nyaman untuk dijangkau. Parkir di jalan adalah

salah satu fasilitasnya. Oleh karena itu, pola parkir paralel dan sudut merupakan dua kemungkinan yang tersedia untuk merancang tempat parkir di jalan raya.

Menurut Syaiful (2013), parkir diartikan sebagai suatu keadaan sesaat dimana suatu mobil dalam keadaan diam karena ditinggalkan oleh pengemudinya. Setiap kendaraan yang berhenti pada suatu tempat tertentu, baik yang diberi tanda rambu lalu lintas maupun tidak, dan tidak hanya untuk keperluan menaikkan atau menurunkan orang, termasuk dalam pengertian parkir. Oleh karena itu, parkir masih diperlukan sebagai area publik atau telah berkembang menjadi utilitas publik yang diperlukan.

Parkir adalah kendaraan yang tidak bergerak sedangkan Tempat parkir adalah suatu tempat yang digunakan untuk menaruh kendaraan roda empat ataupun roda dua yang akan ditinggal sementara oleh pemiliknya. Adapun tujuan adanya tempat parkir adalah untuk membantu kelancaran lalu lintas atau ketertiban lalu lintas dan untuk beristirahatnya alat transportasi yang ditinggal atau dititipkan oleh pemiliknya. Karakteristik parkir perlu diketahui untuk merencanakan lahan parkir. Beberapa karakteristik parkir menurut (Hobbs:1995), terbagi menjadi enam yaitu:

- a. Akumulasi parkir, akumulasi parkir adalah jumlah total kendaraan yang parkir di tempat sesuai dengan jenis dan maksud perjalanannya.
- b. Durasi parkir, merupakan waktu dari sebuah kendaraan yang parkir lama atau tidaknya
- c. Volume parkir, volume parkir merupakan keadaan tempat parkir yang dapat menampung jumlah kendaraan.
- d. Pergantian parkir, adalah periode tertentu untuk kendaraan yang berparkir.

- e. Indeks parkir, indeks parkir adalah pengguna ruang perparkiran
- f. Kapasitas parkir, kapasitas parkir merupakan jumlah kendaraan yang dapat ditampung di suatu lahan tempat parkir.

2.4.1 Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum

Retribusi parkir di tepi jalan umum adalah pungutan terhadap jasa parkir atau tempat parkir bagi masyarakat yang sudah menggunakan lahan parkir ditepi jalan umum. Beberapa daerah membuat kebijakan parkir ditepi jalan umum guna mempermudah masyarakat dan menambah penghasilan daerah. Parkir tepi jalan umum juga salah satu alternatif untuk kendaraan berhenti yang dijaga oleh juru parkir yang sudah diutus oleh pihak pemerintah daerah yaitu dinas perhubungan.

Retribusi parkir di tepi jalan umum adalah retribusi yang dikelola oleh pemerintah daerah sebagai pembayaran tempat atau jasa parkir yang terletak di pinggir ruas jalan. Retribusi parkir di tepi jalan umum termasuk kedalam Pendapatan Asli Daerah (PAD). Retribusi parkir di tepi jalan umum merupakan suatu pungutan untuk masyarakat yang menghentikan kendaraannya dalam jangka waktu yang cukup lama (memarkirkan kendaraan). Dengan adanya tarif parkir membuat masyarakat lebih selektif untuk menggunakan kendaraan dalam berpergian. Karena orang yang menggunakan kendaraan bermotor roda empat akan memikirkan ketersediaan lahan parkir daripada orang yang membawa kendaraan bermotor roda dua. (Afandi, 2022).

2.4.2 Subjek dan Objek Retribusi Parkir

Subjek dari retribusi parkir adalah masyarakat yang memberikan retribusi parkir kepada juru parkir kemudian disetorkan kepada dinas perhubungan dan dinas perhubungan yang nantinya akan memasukkan dalam Pendapatan Asli

Daerah (PAD). Sedangkan objek adalah tempat yang digunakan untuk mengistirahatkan kendaraan jika seseorang ingin kesuatu tempat, dan objek disini ialah tempat parkir di tepi jalan umum.

Berdasarkan subjek retribusi parkir merupakan individu atau kelompok yang menerima dan memperoleh jasa parkir di lokasi parkir baik tempat parkir khusus ataupun parkir di tepi jalan umum. Subjek retribusi parkir merupakan individu atau kelompok yang menggunakan lahan parkir yang disebut sebagai konsumen. Sedangkan objek retribusi parkir yaitu penyediaan lahan parkir atau penediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum (Daulay 2019).

Penyediaan lahan parkir di tepi jalan umum yang artinya bahu jalan kanan dan kiri digunakan sebagai lahan parkir atas ketetapan pemerintah yang diawasi oleh dinas perhubungan dan dijaga oleh juru parkir atau petugas parkir yang sudah mendapatkan pelatihan dan menggunakan atribut yang menjadi ciri khas juru parkir dan menaati Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam bekerja. Sehingga diharapkan pemerintah benar-benar memikirkan lahan parkir yang berada ditepi jalan umum supaya tidak mengganggu lalu lintas.

2.4.3 Kebutuhan Parkir

Kebutuhan tempat parkir adalah untuk mengurangi terjadinya kemacetan lalu lintas. Semakin tingginya jumlah tingkat kendaraan disuatu wilayah atau daerah maka semakin meningkatnya permintaan lahan parkir atau tempat parkir. Sehingga pemerintah daerah harus mempersiapkan lahan guna untuk tempat mesyarakat memarkirkan kendaraanya untuk ditinggal dan dijamin keamanannya. Maka masyarakat akan merasa aman dan nyaman meninggalkan dan menitipkan kendaraannya.

Menurut Direktur Jenderal Perhubungan Darat (1996), penyediaan tempat parkir bagi truk, sepeda motor, mobil pribadi, dan angkutan penumpang umum sangatlah penting. Persyaratan ini sangat bervariasi dan bergantung pada bentuk dan atribut setiap desain dan lokasi parkir. Selain mengganggu arus lalu lintas, parkir di pinggir jalan akan menurunkan kapasitas jalan, meningkatkan lalu lintas, dan mungkin mengakibatkan kecelakaan (Setiaji, 2019).

Ruang yang cukup untuk menampung jumlah mobil saat ini merupakan kriteria kebutuhan parkir. Misalnya, parkir di pinggir jalan umum mengharuskan penggunaan tepi jalan untuk memberikan ruang bagi mobil yang berhenti. Masalah transportasi dan kemacetan lalu lintas mungkin disebabkan oleh kurangnya tempat parkir. Kebutuhan akan tempat parkir akan semakin meningkat seiring dengan meningkatnya jumlah kendaraan di jalan setiap tahunnya.

Berdasarkan adanya parkir di tepi jalan umum pemerintah sudah memastikan lebar jalan dan ruas tepi jalan yang akan digunakan sebagai lahan parkir agar tidak menyebabkan kemacetan lalu lintas dan dikoordinir oleh juru parkir yang sudah ditetapkan oleh dinas perhubungan. Juru parkir juga merupakan kebutuhan parkir yang akan menertibkan dan mengamankan daerah perparkiran. Juru parkir yang akan menerima bayaran dari pengguna lahan parkir.

2.4.4 Jenis-jenis Parkir

Dirjen Perhubungan Darat (1996) mengemukakan bahwa parkir terbagi menjadi dalam beberapa kelompok, yaitu:

- e. *On street Parking* (parkir di badan jalan) merupakan keadaan parkir yang menggunakan kedua bahu jalan sebagai tempat kendaraan bermotor parkir.
- f. *Off street parking* (parkir di luar badan jalan) merupakan sebuah tempat yang

dibuat khusus sebagai tempat parkir, misalnya sebuah mall yang diwajibkan untuk membuat tempat parkir khusus pengunjung.

Dirjen Perhubungan Darat (1996) mengemukakan untuk mendesain suatu tempat parkir harus diperhatikan beberapa kriteria penting, yaitu: keselamatan, kelancaran lalu lintas, serta kelestarian lingkungan, rencana tata guna lahan dan kemudahan bagi penggunaannya. Adapun adanya desain tersebut guna untuk kebaikan tatanan suatu daerah agar terlihat teratur dan masyarakat menjadi nyaman dengan ruang publik yang disediakan atau diatur oleh pemerintah. Sehingga dapat mengurangi kemacetan lalu lintas di jalan umum (Jocunda, Purnomo, 2014)

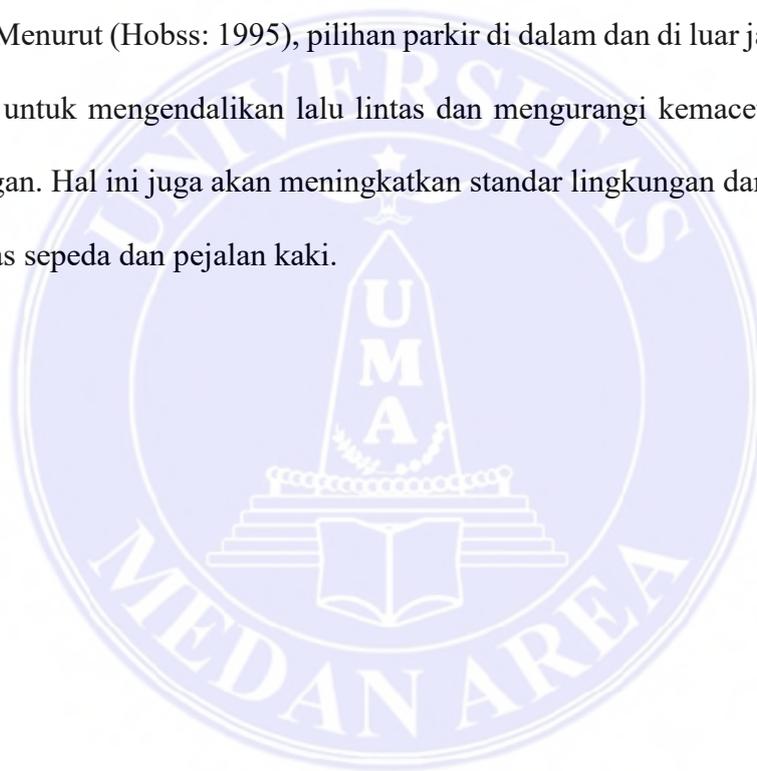
Berdasarkan jenis-jenis parkir, adapun parkir menurut Jocunda, Purnomo, (2014) statusnya sebagai berikut:

- a. Parkir Umum, parkir umum biasanya menggunakan lahan seperti lapangan, di tepi jalan yang pemilihannya dilakukan oleh pemerintah.
- b. Parkir Khusus, parkir khusus biasanya menggunakan lahan sendiri yang tidak dikelola oleh pemerintah tetapi dikelola oleh badan usaha.
- c. Parkir darurat, perparkiran sementara yang sering di kunjungi biasanya memakai lahan seperti lapangan, ruas jalan, lahan sendiri yang dikelola oleh pemerintah daerah, individu atau badan usaha
- d. Taman Parkir, dibangun dengan standart bangunan perparkiran yang di fasilitasi oleh kebutuhan parkir yang dikelola oleh pemerintah suatu daerah.
- e. Gedung Parkir , tempat yang berupa bangunan dan dimanfaatkan untuk tempat parkir yang dikelola oleh pihak pihak ketiga atau pemerintah daerah yang sudah mendapatkan izin pemerintah.

2.4.5 Pengendalian Parkir

Pengendalian parkir ini merupakan suatu kendali yang perlu dilakukan, karena tanpa adanya pengendalian akan terjadi ketidak teraturan dalam tata letak kota/daerah. Pengendalian parkir bertujuan agar mengurangi tingkat kemacetan di sebuah daerah dan membuat masyarakat teratur dalam meletakkan atau meninggalkan kendaraannya. Selain itu juga, pengendalian parkir berhubungan erat dengan pengawas ataupun penjaga tempat parkir.

Menurut (Hobss: 1995), pilihan parkir di dalam dan di luar jalan raya sangat penting untuk mengendalikan lalu lintas dan mengurangi kemacetan, polusi, dan kebisingan. Hal ini juga akan meningkatkan standar lingkungan dan meningkatkan mobilitas sepeda dan pejalan kaki.



2.5 E-Parking

2.5.1 Defenisi *E-Parking*

Secara umum *E-Parking* adalah suatu sistem parkir elektronik dengan memanfaatkan teknologi digital bertujuan memantau dan mengelola parkir di area tertentu. Sistem ini memanfaatkan sensor, kamera, dan perangkat lunak untuk mendeteksi dan merekam kendaraan yang keluar masuk dari area parkir. Sistem parkir elektronik (*E-Parking*) telah menjadi solusi inovatif dalam mengatasi masalah parkir di berbagai kota besar di Indonesia salah satunya Kota Medan yang sedang berusaha untuk menjadi *smart city*.

E-Parking adalah sebuah konsep yang menggunakan teknologi digital untuk memantau, mengelola, dan mengoptimalkan penggunaan ruang parkir. Sistem ini beroperasi dengan memanfaatkan sensor, kamera, dan perangkat lunak yang terhubung secara terintegrasi untuk mendeteksi dan merekam informasi tentang kendaraan yang keluar masuk dari area parkir. Data yang diperoleh oleh sistem *E-Parking* kemudian dapat digunakan untuk memberikan informasi real-time kepada pengguna mengenai ketersediaan tempat parkir, mengelola tarif parkir, dan mengoptimalkan penggunaan tempat parkir yang ada.

Keunggulan utama dari sistem *E-Parking* adalah kemampuannya untuk memberikan informasi real-time tentang ketersediaan tempat parkir kepada pengguna. Dengan informasi ini, pengguna bisa merencanakan perjalanan mereka dengan lebih efisien dan menghindari kemacetan yang disebabkan oleh kendaraan yang mencari tempat parkir. Selain itu, sistem *E-Parking* juga dapat meningkatkan pengalaman pengguna dengan menyediakan berbagai opsi pembayaran, termasuk pembayaran melalui aplikasi mobile atau kartu prabayar, sehingga mengurangi

ketergantungan pada uang tunai.

2.5.1 Manfaat Implementasi *E-parking*

Sistem *E-Parking* menunjukkan sejumlah manfaat. Pada awalnya, konsumen dapat dengan cepat memastikan apakah tempat parkir tersedia sebelum melakukan perjalanan ke alamat tersebut, sehingga menghemat waktu dan mengurangi kemacetan. Kedua, teknologi ini memungkinkan pembayaran parkir elektronik, sehingga mengurangi ketergantungan pada uang tunai dan meningkatkan efektivitas administrasi. Ketiga, pemerintah dapat mempelajari kebiasaan parkir dan memaksimalkan pemanfaatan ruang parkir yang tersedia dengan memanfaatkan data yang dikumpulkan dari sensor dan kamera.

Implementasi *E-Parking* juga memberikan manfaat bagi pemerintah dan pengusaha parkir. Pemerintah dapat memanfaatkan data dari sistem *E-Parking* untuk mempelajari kebiasaan parkir dan memanfaatkan tempat parkir yang ada dengan lebih baik. Hal ini dapat membantu meminimalkan kemacetan jalan dan meningkatkan efisiensi angkutan umum. Di sisi lain, pengusaha parkir dapat meningkatkan pendapatan mereka dengan meningkatkan kapasitas penggunaan ruang parkir dan mengurangi biaya administrasi.

Namun, implementasi *E-Parking* juga memiliki beberapa tantangan. Salah satunya adalah biaya investasi awal yang diperlukan untuk membangun infrastruktur sensor dan kamera yang diperlukan untuk sistem ini. Selain itu, perlu adanya koordinasi yang baik antara pemerintah, pengusaha parkir, dan masyarakat untuk memastikan kesuksesan implementasi *E-Parking*. Pemerintah juga perlu memastikan bahwa kebijakan dan regulasi yang diterapkan mendukung penggunaan sistem *E-Parking* ini.

Secara keseluruhan, *E-Parking* adalah sebuah solusi inovatif yang dapat meningkatkan efisiensi dan kualitas layanan parkir di kota-kota besar .Dengan implementasi yang tepat dan dukungan dari semua pihak terkait, sistem ini dapat membantu menciptakan lingkungan urban yang lebih bersih, aman, dan efisien.

2.6 Penelitian Terdahulu

Penulis kemudian menggunakan temuan penelitian dari para akademisi sebelumnya sebagai referensi. Randi (2018) menegaskan bahwa penelitian terdahulu ini berfungsi sebagai salah satu sumber daya yang digunakan peneliti saat melakukan penelitiannya sendiri untuk menyempurnakan teori yang diterapkan ketika mengevaluasi penelitian yang telah selesai.

Tabel 1 Penelitian Terdahulu

| NO | Judul | Metode | Hasil Penelitian | Perbedaan dan Persamaan | Sumber |
|----|--|------------|--|---|--------|
| 1. | KAJIAN POTENSI RETRIBUSI PARKIR DI KOTA MEDAN (Hamidun Batubara, Marwan Lubis, Muhammad Husni Malik Hasibuan/2019) | Kualitatif | Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak semua ruas jalan dapat dimanfaatkan untuk parkir on road, kemauan membayar pengguna parkir di Kota Medan masih tergolong rendah, dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari retribusi parkir on road akan tercapai. melalui penetapan Satuan Tempat Parkir (SRP) yang jelas. | Kedua judul tersebut berfokus pada sektor parkir di Kota Medan. Judul pertama menyoroti potensi retribusi parkir, sedangkan judul kedua membahas implementasi kebijakan e-parking. Keduanya memiliki keterkaitan langsung dengan pengelolaan parkir dan pendapatan asli daerah (PAD) dari sektor tersebut. Adapun perbedaan dengan penelitian ini yaitu Implementasi Kebijakan E-Parking lebih menggunakan pendekatan manajerial dan kebijakan publik | Jurnal |

| | | | | | |
|----|---|------------|---|--|---------|
| 2. | ANALISIS EFEKTIVITAS PAJAK PARKIR DAN RETRIBUSI PARKIR TERHADAP EFEKTIVITAS PENDAPATAN ASLI DAERAH KOTA MEDAN (Lyca Monica Daulay/2019) | Kualitatif | Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas pajak parkir pada tahun 2014 – 2016 cukup efektif dan untuk efektifitas retribusi parkir belum efektif. | Penelitian saat ini dengan penelitian terdahulu sama-sama berkaitan dengan pajak dan retribusi parkir di Kota Medan, adapun perbedaan dengan penelitian saat ini yaitu menyoroti pelaksanaan kebijakan e-parking oleh Dinas Perhubungan. Fokusnya adalah pada bagaimana kebijakan ini diterapkan, tantangan yang dihadapi, efektivitas sistem e-parking dalam mengatasi kebocoran pendapatan, serta dampak penggunaan teknologi e-parking terhadap pelayanan parkir di Kota Medan. | Skripsi |
| 3. | IMPLEMENTASI RETRIBUSI PARKIR DI TEPI JALAN UMUM KABUPATEN TEGAL (Darari Priya setiaji dan R Slamet Santoso/2019/) | Kualitatif | Berdasarkan temuan penelitian, penerapan tarif parkir pada jalan umum di Kabupaten Tegal Nomor 3 Tahun 2014 tidak berhasil karena tidak efisiennya pelaksanaan beberapa peraturan daerah. | Kedua judul sama-sama membahas tentang pengelolaan retribusi parkir, meskipun dengan metode dan konteks yang berbeda. Judul terdahulu menitikberatkan pada implementasi sistem retribusi parkir konvensional di tepi jalan umum, sedangkan penelitian saat ini lebih fokus pada implementasi sistem parkir elektronik (e-parking). Namun, keduanya memiliki tujuan yang sama, yaitu mengatur pemungutan retribusi parkir demi optimalisasi pendapatan daerah. | Jurnal |

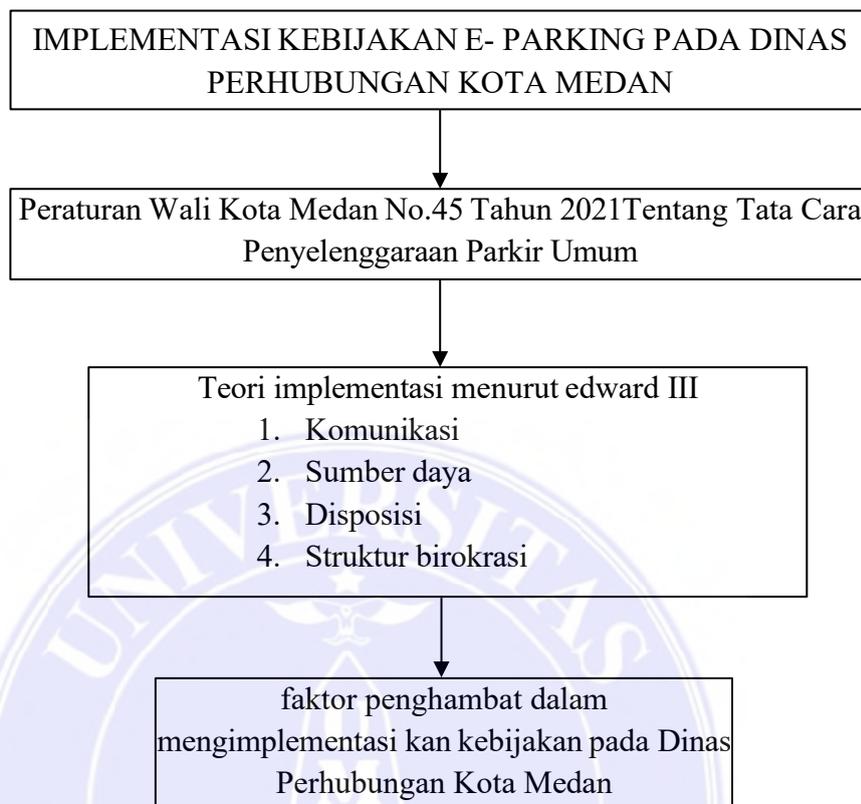
| | | | | | |
|---|--|------------|---|--|---------|
| 4 | PENGELOLAAN RETRIBUSI PARKIR DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH KABUPATEN MINAHASA (Vincent Kevin Rumengan, Ismail Rachman, dan Neni Kumayas /2020) | Kualitatif | Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan retribusi parkir dalam meningkatkan pendapatan asli daerah di Kabupaten Minahasa belum terlaksana dengan baik, karena masih kurangnya sarana dan prasarana yang memadai sehingga menyebabkan banyak masyarakat yang mengeluhkan kenyamanan dan keamanan parkir di terminal Kawangkoang daerah. | Penelitian sebelumnya dan saat ini mengenai retribusi parkir memiliki kesamaan. Lokasi penelitian berbeda dengan penelitian saat ini. | .Jurnal |
| 5 | IMPLEMENTASI KEBIJAKAN RETRIBUSI PELAYANAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM (Muhammad Afandi/2022) | Kualitatif | Berdasarkan temuan penelitian, penerapan Kebijakan Retribusi Parkir pada pinggir jalan umum di Kota Palu dinilai kurang optimal karena kebijakan tersebut tidak memberikan dampak bagi masyarakat, tidak memberikan manfaat kepada masyarakat, tidak menghasilkan perubahan, dan sumber daya yang tidak memadai. Mobilisasi yang tidak memadai. | Kedua penelitian ini serupa karena sama-sama fokus pada strategi pengelolaan retribusi parkir dengan tujuan meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) dan memperbaiki tata kelola parkir. Namun, terdapat perbedaan yang signifikan dalam metode kebijakan yang digunakan. | Jurnal |

Sumber: diolah peneliti

2.7 Kerangka Berpikir

Kerangka berpikir dalam penelitian ini merupakan suatu cara berpikir yang menjadi batu loncatan bagi peneliti untuk menganalisis fakta di lapangan tanpa menciptakan persepsi sendiri. Sebagai pendukung atau desain.

Gambar 1 Kerangka Berpikir



Sumber : diolah peneliti

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Untuk memperoleh pemahaman penelitian secara menyeluruh dan memudahkan tahapan selanjutnya dalam proses analisis data, kenali terlebih dahulu jenis penelitiannya. Penelitian ini menggunakan teknik deskriptif dengan analisis kualitatif, yang bertujuan untuk mengidentifikasi dan mengumpulkan informasi rinci, bukan informasi dalam jumlah besar.

Creswell menyebutkan dalam Jamaluddin Ahmad (2015:52) bahwa penelitian kualitatif adalah suatu strategi untuk mengkaji dan memahami persepsi banyak orang atau sekelompok orang tentang masalah sosial atau kemanusiaan. Selama proses penelitian kualitatif, upaya signifikan dilakukan dengan mengajukan pertanyaan dan mengikuti protokol, mengumpulkan data spesifik dari partisipan, melakukan analisis data induktif yang dimulai dengan tema luas, dan menilai relevansi temuan. Struktur atau kerangka laporan studi akhir dapat dimodifikasi. Berikut beberapa ciri penelitian kualitatif:

- a. Penelitian kualitatif bersifat naturalistik, artinya peneliti berperan sebagai alat utama dan lingkungan terdekat berperan sebagai sumber data.
- b. Data dari penelitian kualitatif bersifat deskriptif; yaitu berasal dari foto, video, catatan lapangan, transkrip wawancara, makalah pribadi dan resmi, kenangan, dan bahan lainnya.
- c. Selain data yang dihasilkan, penelitian kualitatif juga sangat menekankan proses, yaitu proses yang terjadi pada sumber data (subyek/informan,

objek, dan responden) serta seluruh konteks di sekitarnya.

- d. Untuk membuat ringkasan dari seluruh data yang dikumpulkan, analisis data penelitian kualitatif seringkali menggunakan pendekatan induktif.
- e. Dari sudut pandang partisipan, penelitian kualitatif menyelidiki makna kehidupan dengan mengkaji bagaimana subjek mengkonstruksi atau menyusun makna dan kemudian mendeskripsikan makna yang telah mereka kumpulkan.

Berikut adalah proses pelaksanaan penelitian kualitatif.

1. Pilih fenomena yang perlu diselidiki atau diklarifikasi. Pada titik tertentu, penekanan observasi harus dipersempit karena penelitian kualitatif mengambil metode sintesis.
2. Pengumpulan data menggunakan pendekatan kualitatif. Untuk mengumpulkan data, penelitian kualitatif menggunakan berbagai instrumen dan teknik. Tidak seperti penelitian eksperimental, yang bergantung pada satu strategi, penelitian sering kali menggunakan banyak pendekatan secara bersamaan untuk mendapatkan gambaran komprehensif tentang tindakan atau kejadian. Data kualitatif dapat dikumpulkan dengan menggunakan berbagai metode, seperti catatan lapangan, riwayat kasus, wawancara, kuesioner, pencatatan, dan observasi.
3. Periksa data untuk mengetahui trennya. Dalam penelitian kualitatif, data mentah adalah informasi yang belum pernah dikumpulkan sebelumnya.
4. Verifikasi temuan awal dengan mengumpulkan data tambahan atau data berulang. Peneliti akan mengkonfirmasi hasilnya setelah mereka menemukan tren pada datanya. Triangulasi digunakan untuk memvalidasi

kesimpulan penelitian karena menggunakan teknik pengumpulan data yang bervariasi.

5. Memanfaatkan data atau prosedur untuk mendaur ulang. Setelah analisis data awal selesai, topik penelitian harus didefinisikan ulang dan penekanannya dipersempit. Corong digunakan untuk mewakili prosedur ini.

3.2 Informan Penelitian

Seseorang yang akan berperan sebagai narasumber dan memberikan informasi tentang keadaan dan keadaan penelitian dikenal sebagai informan penelitian. Oleh karena itu, informan perlu memiliki pengetahuan langsung tentang konteks penelitian dan terikat erat dengan objek penelitian. Bagong Suyatno (2005:172) menyebutkan ada beberapa macam informan, antara lain:

- a. Informan kunci adalah individu berpengalaman yang memiliki beragam data penting yang diinginkan peneliti.
 - b. Mereka yang mempunyai hubungan langsung merupakan informan utama.
 - c. Informan tambahan adalah individu yang dapat berbagi informasi.
- Meskipun ketidakmampuan mereka untuk terlibat langsung dalam interaksi sosial atau komunikasi yang diteliti.

Tabel 2 Informan Penelitian

| No | Uraian | Jumlah Orang | Keterangan |
|--------------|---|--------------|-------------------|
| 1 | Kepala Bidang Lalu Lintas dan Angkutan (AMI KHOLIS HASIBUAN,S.SiT,MT) | 1 | Informan Kunci |
| 2 | Inspektur Sub Koordinator Lingkup Parkir Khusus (MHD.ZEIN LUBIS,ST) | 1 | Informan Utama |
| 3 | Petugas Parkir | 4 | Informan Utama |
| 4 | Masyarakat | 4 | Informan Tambahan |
| Total | | | 10 orang |

3.3 Teknik Pengumpulan Data

Karena pengumpulan data adalah tujuan utama penelitian, maka teknik pengumpulan data adalah bagian terpenting dari proses tersebut. Hal ini dikarenakan strategi pengumpulan data memungkinkan peneliti mendapatkan data secara sistematis. Dalam melakukan penelitian kualitatif, peneliti lebih memilih menggunakan sumber asli, lingkungan alam, dan metode pengumpulan data yang menekankan pada observasi partisipan, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Metode pengumpulan data ini merupakan ciri penelitian kualitatif (Sugiyono 2016, hal 224)

3.3.1 Observasi

Peneliti mengumpulkan informasi melalui pemeriksaan menyeluruh terhadap item penelitian atau dengan observasi langsung, klaim Moleong (2014: 127). Penggunaan prinsip-prinsip tata kelola yang baik—disiplin positif, dorongan positif, dan dukungan guru—terlihat dalam aktivitas sehari-hari para responden yang merupakan administrator sekolah. Catatan faktual, teliti, dan mendalam

mengenai keadaan sosial dan kondisi lapangan merupakan data observasi.

3.3.2 Observasi Partisipatif

Dalam observasi ini, peneliti berpartisipasi dalam aktivitas sehari-hari subjek atau menggunakannya sebagai sumber data. Informasi yang diperoleh dari observasi partisipan akan lebih komprehensif, akurat, dan menunjukkan tingkat signifikansi setiap aktivitas yang diamati.

3.3.3 Wawancara

Dalam penelitian, wawancara adalah pertukaran pertanyaan dan jawaban lisan antara dua partisipan atau lebih. Informan juga dapat memberikan informasi secara langsung pada saat wawancara ini. Wawancara mendalam adalah suatu metode pengumpulan data atau informasi dengan cara mewawancarai informan secara langsung dengan tujuan memperoleh pemahaman menyeluruh tentang pokok bahasan yang diteliti. Wawancara dengan organisasi atau lembaga pendidikan terkait dilakukan untuk penelitian ini (Emzir, 2014: 3).

3.4 Teknik Analisis Data

Miles dan Huberman mendefinisikan analisis data sebagai tindakan menemukan dan mengklasifikasikan item lapangan secara metodis, seperti transkrip wawancara. Pendekatan analisis data penelitian ini memadukan model analisis interaktif dengan analisis deskriptif kualitatif. Saat menggunakan model interaktif untuk analisis data, elemen utamanya adalah:

1. Reduksi data. Tindakan memilih dan memusatkan perhatian pada data kasar yang diperoleh dari catatan lapangan agar lebih sederhana disebut reduksi data. Hal ini dilakukan agar lebih mudah dalam menarik kesimpulan pada akhirnya dengan mengorganisasikan data, menghilangkan informasi yang

tidak relevan, serta menekankan, memperpendek, dan memperjelasnya.

2. Penyajian Data. Kumpulan informasi yang disusun secara metodis yang memungkinkan adanya inferensi disebut penyajian data. Selain itu, diperlukan tabel dan kolom tertentu untuk menampilkan data.
3. Penarikan kesimpulan. Langkah terakhir dalam proses penelitian adalah penarikan kesimpulan, dimana informasi yang dikumpulkan akan mengarah pada garis besar atau kesimpulan yang merangkum keseluruhan penelitian. Sebagai penelitian tahap terakhir, kesimpulan masih diuji dengan metode dan data lapangan yang dilakukan dengan pengamatan rasional dan diterapkan pada ilmu pengetahuan.

3.5 Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Dinas Perhubungan Kota Medan Sumatera Utara tepatnya di Jl. Pinang Baris, Lalang, Kecamatan Medan Sunggal.

Tabel 3. Rincian Jadwal Penyelesain Skripsi

| No | URUTAN KEGIATAN | 2024 | | | | | | | |
|----|-----------------------------|------|---|---|---|---|---|---|----|
| | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Pengajuan Judul | ■ | | | | | | | |
| 2 | Penyusunan Proposal | | ■ | | | | | | |
| 3 | Seminar Proposal | | | ■ | | | | | |
| 4 | Perbaikan Proposal | | | | ■ | | | | |
| 5 | Penelitian | | | | | ■ | | | |
| 6 | Penyusunan Skripsi | | | | | | ■ | | |
| 7 | Revisi Skripsi | | | | | | | ■ | |
| 8 | Sidang Meja Hijau | | | | | | | | ■ |
| 9 | Revisi final | | | | | | | | ■ |
| 10 | Penyerahan Skripsi ke prodi | | | | | | | | ■ |

Sumber : diolah peneliti

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Implementasi Kebijakan *E-parking* Pada Dinas Perhubungan Kota Medan adapun kesimpulan sebagai berikut.

1. Penerapan kebijakan E-Parking di Kota Medan belum optimal namun memiliki dampak positif yang sangat layak dan praktis, mengingat kota ini adalah salah satu kota besar yang telah mengadopsi teknologi dalam berbagai aspek kehidupan sehari-hari. Dengan infrastruktur canggih dan kemajuan teknologi yang ada, Medan memiliki potensi besar untuk menjadi model smart city di Indonesia. Penggunaan aplikasi E-Parking sebagai bagian dari kebijakan Wali Kota mencerminkan komitmen Medan untuk tidak hanya mengikuti tren teknologi, tetapi juga memanfaatkannya guna meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam pengelolaan parkir. Namun, meskipun kebijakan ini menunjukkan kesiapan Medan untuk menjadi contoh kota pintar yang sukses, implementasinya belum sepenuhnya efektif. Tantangan dalam penerapan sistem E-Parking mungkin meliputi masalah teknis, kurangnya sosialisasi, atau resistensi dari masyarakat dan pengelola parkir, yang memerlukan perhatian dan perbaikan agar kebijakan ini dapat mencapai tujuan yang diharapkan.
2. Adapun faktor penghambat dalam Implementasi Kebijakan *E-parking* pada Dinas perhubungan Kota Medan berdasarkan indikator penelitian yaitu:
 - a. Komunikasi, Kurangnya sosialisasi dan pemahaman *e-parking* kepada masyarakat.

- b. Sumber daya, Kebiasaan Lama Masyarakat dan Juru Parkir.

5.2 Saran

1. Dinas Perhubungan Kota Medan sebaiknya meningkatkan sosialisasi dan komunikasi mengenai sistem *E-Parking* dengan cara yang lebih konsisten dan menyeluruh. Hal ini dapat dilakukan melalui kampanye informasi yang melibatkan berbagai media, pelatihan bagi pengguna dan pelaksana, serta penyediaan dukungan teknis yang mudah diakses. Selain itu, perlu adanya sesi tanya jawab atau forum feedback agar masyarakat dapat mengajukan pertanyaan dan mendapatkan klarifikasi. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan pemahaman dan penerimaan masyarakat terhadap *E-Parking* dapat meningkat, sehingga sistem dapat berjalan lebih efektif.
2. Untuk mendukung transisi ke sistem pembayaran digital, penyelenggaraan pelatihan khusus bagi juru parkir sangatlah penting. Pelatihan ini harus mencakup penggunaan sistem pembayaran digital serta teknik untuk membantu pengguna yang mungkin mengalami kesulitan. Dengan memberikan keterampilan dan pengetahuan yang memadai kepada juru parkir, diharapkan kepercayaan masyarakat terhadap metode pembayaran baru ini akan meningkat. Selain itu, setelah implementasi program, perlu dilakukan monitoring dan evaluasi secara berkala untuk menilai efektivitasnya. Pengumpulan umpan balik dari masyarakat dan juru parkir akan menjadi kunci dalam melakukan perbaikan berkelanjutan, sehingga program dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan harapan pengguna.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Agustino, Leo. (2014). *Dasar- Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: CV. Alfabeta.
- Agustino, Leo. 2017. *Dasar-dasar Kebijakan Publik*. Bandung : Alfabeta
- AG, Subarsono.2011. *Analisis Kebijakan Publik (Konsep Teori dan Aplikasi)*
Yogyakarta:Pustaka Pelajar
- Ayuningtyas, Dumilah. (2014). *Kebijakan Kesehatan Prinsip dan Praktik*.
Jakarta:Raja Grafindo Persada
- Daulay, Haidar Putra (2019). *Pendidikan Islam di Indonesia:Historiografi dan Eksistensinya*. Jakarta: Kencana.
- Hobbs, F. D. (1995) *Perencanaan dan Teknik lalulintas (Edisi Kedua)*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta
- Mulyadi, Deddy, 2015, *Study Kebijakan Publik Dan Pelayanan Publik*, Bandung : Alfabeta.
- Makmur. 2011. *Efektivitas Kebijakan Kelembagaan Pengawasan*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Purwanto, Erwan Agus dan Dyah Ratih Sulistyastuti. 2015. *Implementasi Kebijakan Publik: Konsep dan Aplikasinya di Indonesia*. Yogyakarta: Gava Media
- Randi. 2018. *Teori Penelitian Terdahulu*. Jakarta: Erlangga
- Setiaji, C. A. 2019. *Strategi Pembelajaran Inovatif*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Subianto, Agus. 2020. *Kebijakan Publik*. Surabaya : Brilliant.
- Tahir, Arifin 2014. *Kebijakan Publik & Transparansi Penyelenggaraan*. Pemerintah Daerah. Alfa Beta. Bandung.
- Yulianto Kadji. (2015). *Formulasidan Implementasi Kebijakan Publik Kepemimpinan Dan Perilaku Birokrasi Dalam Fakta Realitas*. Gorontalo: UNG.

Skripsi / Jurnal

- Artamalia & Indah Prabawati. (2019). *Evaluasi Program E-Parking Di Kawasan Parkir Balai Kota Surabaya*
- Darari Priya Setiaji, & R Slamet Santoso. 2019. *Implementasi Retribusi Parkir Di Tepi Jalan Umum Kabupaten Tegal*. *Journal of Public Policy and Management Review*, 8(4), 55–69.
- Emzir, *Metodologi Penelitian Kualitatif: Analisis Data*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014), hal. 3
- eJournal Administrasi Negara, Volume 5, Nomor 2 , 2017: 5896 – 5908
- Lycia. M. D. 2023. *Analisis Efektivitas Pajak Parkir dan Retribusi Parkir terhadap Efektivitas Pendapatan Asli Daerah Kota Medan*. Pancabudi.ac.id.
- M. Ridwan Rangkuti (2021) *Komunikasi kebijakan publik dalam implementasi program e-parking di kota Medan*
- Hamidun Batubara, Lubis, M., & Hasibuan, M. 2019. *Kajian Potensi Retribusi Parkir di Kota Medan*. *Seminar Nasional Teknik SEMNASTEK UISU*, 2(1), 114–119.
- Jocunda, S. & Purnomo, Y., 2014. *Karakteristik Ruang Parkir Di Pusat Perbelanjaan Jalan Tanjungpura Kota Pontianak*. *Langkau Betang: Jurnal Arsitektur*. 1(1), pp. 27–36.

Muhammad Afandi. 2022. *Implementasi Kebijakan Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum*. *Jurnal Kebijakan Publik*, 13(1), 99–103.

Sri Endang Rahayu (2023) *Potensi Retribusi Parkir Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Medan, Sebelum Dan Sesudah Penerapan E-Parkir*

Silvana Dewi Prdita (2021) *Efektivitas Sistem Parkir Elektronik (E-Parkir) Dalam Pengelolaan Parkir Di Kota Surakarta*

Vincent Kevin Rumengan, Rachman I, Neni Kumayas. 2020. *Pengelolaan Retribusi Parkir Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Minahasa*. *Jurnal Eksekutif*.

Undang-undang

Undang-Undang Republik Indonesia: Seperti UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Peraturan Pemerintah: Seperti PP No. 32 Tahun 2011 tentang Manajemen Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.



LAMPIRAN

1. PEDOMAN OBSERVASI

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN *E-PARKING* PADA DINAS PERHUBUNGAN di KOTA MEDAN

Berikut adalah pedoman observasi yang digunakan peneliti dalam melakukan penelitian adalah sebagai berikut:

1. Lokasi
2. Sarana dan prasarana
3. Sikap Petugas
4. Respon masyarakat

Instansi :
Lokasi :
Tanggal :

| NO | YANG DIAMATI | YA | TIDAK | BUKTI/ INDIKATOR |
|----|---|----|-------|---------------------|
| 1 | Struktur organisasi | | | |
| 2 | Laporan Kinerja Program | | | |
| 3 | Visi dan Misi | | | |
| 4 | Sikap Pengawai | | | |
| 5 | Sikap/Respon masyarakat | | | |
| 6 | Sosial media instansi | | | |
| 7 | Sarana Prasarana : a) Ruang kerja b) Ruang tunggu c) Parkir d) Toilet e) Papan informasi f) Perangkat computer g) WIFI | | | |

2. PEDOMAN WAWANCARA

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN *E-PARKING* PADA DINAS PERHUBUNGAN di KOTA MEDAN

A. Identitas responden

1. Nama :
2. Jenis Kelamin :
3. Umur :
4. Pekerjaan :
5. Pendidikan :

B. Pertanyaan-Pertanyaan penelitian

1. (Pertanyaan sesuaikan dengan indikator dari teori yang digunakan kaitkan dengan fokus penelitian)?
.....
.....
.....
2. (Pertanyaan sesuaikan dengan indikator dari teori yang digunakan kaitkan dengan fokus penelitian)?
.....
.....
.....
3. (Pertanyaan sesuaikan dengan indikator dari teori yang digunakan kaitkan dengan fokus penelitian)?
.....
.....
.....
4. (Pertanyaan sesuaikan dengan indikator dari teori yang digunakan kaitkan dengan fokus penelitian)?
.....
.....
.....

3. SURAT PENGANTAR RISET



UNIVERSITAS MEDAN AREA

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Kampus I : Jalan Kolam Nomor 1 Medan Estate ☎ (061) 7360168, 7366878, 7364348 📠 (061) 7368012 Medan 20223
Kampus II : Jalan Setiabudi Nomor 79 / Jalan Sei Serayu Nomor 70 A ☎ (061) 8225602 📠 (061) 8226331 Medan 20122
Website: www.uma.ac.id E-Mail: univ_medanarea@uma.ac.id

Nomor : 1749/FIS.0/01.10/VII/2024
Lamp : -
Hal : Permohonan Izin Pengambilan Data/Riset

Medan, 04 Juli 2024

Kepada Yth,
Bapak Kepala Badan Riset Dan Inovasi Daerah Kota Medan
Di Tempat

Dengan hormat,
Kami dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Medan Area, dengan ini mengajukan permohonan kepada Bapak/Ibu untuk dapat kiranya menerima mahasiswa kami berikut ini :

Nama : Rynaldi Muhamta
N P M : 208510031
Program Studi : Ilmu Pemerintahan

Saat ini sedang membutuhkan beberapa data pada Kantor Dinas Perhubungan Kota Medan untuk menyelesaikan penelitian/riset yang berjudul :

"Implementasi Kebijakan E-Parking pada Dinas Perhubungan di Kota Medan"

Perlu kami jelaskan bahwa penelitian dan pengambilan data yang diperlukan ini semata-mata hanya untuk kepentingan penelitian dalam penyusunan skripsi. Sehubungan dengan ini, kami mohon kesediaan Bapak/Ibu untuk memberikan data yang diminta pada bidang yang bersangkutan.

Demikian surat ini kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.


Dekan
Musthafa S., S.Sos, M.I.P

Tembusan:
1. Ka. Prodi Ilmu Pemerintahan
2. Mahasiswa ybs
3. Arsip



4. SURAT PENGANTAR RISET DARI BRIDA



PEMERINTAH KOTA MEDAN BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH

Jalan Jenderal Besar A. H. Nasution Nomor 32, Medan Johor, Medan Sumatera Utara 20143,
Telepon (061) 7873439 Faksimile (061) 7873314
Laman brida.pemkomedan.go.id, Pos-el brida@pemkomedan.go.id

SURAT KETERANGAN PRA RISET

Nomor : 000/1639

DASAR : 1. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor : 8 Tahun 2022, tanggal 30 Desember 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 15 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Medan.
2. Peraturan Walikota Medan Nomor : 97 Tahun 2022, tanggal 30 Desember 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Medan.

MENIMBANG : Surat dari Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Medan Area Nomor 1749/FIS.0/01.10/VI/2024 Tanggal 04 Juli 2024 Perihal Permohonan Izin Pengambilan Data/Riset.

NAMA : Rynaldi Muhamta
NIM : 208510031
JURUSAN : Ilmu Pemerintahan
JUDUL : "Impelementasi Kebijakan E-Parking Pada Dinas Perhubungan di Kota Medan"
LOKASI : Dinas Perhubungan Kota Medan
LAMANYA : 1 (satu) Bulan
PENANGGUNG JAWAB : Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Medan Area

Melakukan Pra Riset, dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Sebelum melakukan Pra Riset terlebih dahulu harus melapor kepada pimpinan Perangkat Daerah lokasi Yang ditetapkan.
2. Mematuhi peraturan dan ketentuan yang berlaku di lokasi Pra Riset .
3. Tidak dibenarkan melakukan Pra Riset atau aktivitas lain di luar lokasi yang telah ditetapkan.
4. Hasil Laporan Pra Riset diserahkan kepada Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah Kota Medan selambat lambatnya 2 (dua) bulan setelah Pra Riset dalam bentuk *softcopy* atau melalui Email (brida@pemkomedan.go.id).
5. Surat Keterangan Pra Riset dinyatakan batal apabila pemegang surat keterangan tidak mengindahkan ketentuan atau peraturan yang berlaku pada Pemerintah Kota Medan.
6. Surat Keterangan Pra Riset ini berlaku sejak tanggal dikeluarkan.

Demikian Surat ini diperbuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Medan
Pada Tanggal : 08 Juli 2024



Ditandatangani secara elektronik oleh
Kepala Badan
Riset dan Inovasi Daerah,

Mansuryah, S. Sos, M. AP
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP 196805091989091001

Tembusan :

1. Wali Kota Medan.
2. Kepala Dinas Perhubungan Kota Medan.
3. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Medan Area.



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSRF
UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5. A. 3. a. 1 "Informasi Elektronik termasuk Dokumen Elektronik dan/atau hasil pencetakan dari data elektronik yang
sifat"

5. SURAT SELESAI RISET



PEMERINTAH KOTA MEDAN DINAS PERHUBUNGAN

Jalan Pinang Baris Nomor 114A, Medan Sunggal, Medan, Sumatera Utara 20127
Telepon (061) 8450542 Laman : Dishub.Pemkomedan.go.id
Pos-el : dishubkotamedan1@gmail.com

Medan, 18 Juli 2024

Nomor : 009/3374
Lampiran : -
Hal : Selesai Riset

Yth. Dekan Fakultas Ilmu Sosial
Dan Ilmu Politik Universitas Medan Area
di
Tempat

Dengan hormat ;

1. Menindak lanjuti Surat Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah; Nomor: 000/1639 Tanggal 08 Juli 2024 Perihal : Surat Keterangan Pra Riset A.n Rynaldi Muhamta ; NIM : 208510031 ; Jurusan ; Ilmu Pemerintahan : Implementasi Kebijakan E-Parking pada Dinas Perhubungan Kota Medan.
2. Berkaitan dengan hal tersebut di atas, dijelaskan bahwa yang bersangkutan telah selesai melaksanakan Riset dan pengambilan data pada Dinas Perhubungan Kota Medan.
3. Demikian disampaikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

An. Kepala Dinas Perhubungan Kota Medan
Sekretaris
U.b KASUBBAG KEPEGAWAIAN DAN UMUM
DINAS PERHUBUNGAN KOTA MEDAN



6. HASIL OBSERVASI

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN *E-PARKING* PADA DINAS PERHUBUNGAN di KOTA MEDAN

Berikut adalah hasil observasi yang penemuan peneliti dalam melakukan penelitian adalah sebagai berikut:

1. Lokasi
2. Sarana dan prasarana
3. Sikap Petugas
4. Respon masyarakat

Instansi : Dinas Perhubungan Kota Medan
 Lokasi : Jl. Pinang Baris, Lalang, Kec. Medan Sunggal, Kota Medan,
 Sumatera Utara 20127
 Tanggal : 18 Juli 2024

| NO | YANG DIAMATI | YA | TIDAK | BUKTI/ INDIKATOR |
|----|---|---------------------------------|-------|---------------------|
| 1 | Struktur organisasi | √ | | |
| 2 | Laporan Kinerja Program | √ | | |
| 3 | Visi dan Misi | √ | | |
| 4 | Sikap Pegawai | √ | | |
| 5 | Sikap/Respon masyarakat | √ | | |
| 6 | Sosial media instansi | √ | | |
| 7 | Sarana Prasarana : a) Ruang kerja b) Ruang tunggu c) Parkir d) Toilet e) Papan informasi f) Perangkat computer g) WIFI | √ √ √ √ √ √ √ | | |

7. HASIL WAWANCARA

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN *E-PARKING* PADA DINAS PERHUBUNGAN di KOTA MEDAN

A. Identitas responden

1. Nama : Ami Kholis Hasibuan,S.SiT,MT
2. Jenis Kelamin : Laki-laki
3. Umur : 45
4. Pekerjaan : Kepala Bidang Lalu Lintas dan Angkutan
5. Pendidikan : S2

B. Pertanyaan-Pertanyaan penelitian

1. Menurut Bapak bagaimanakah proses komunikasi diantara pelaksana kebijakan e-parkir di Dinas Perhubungan Daerah Kota Medan antar penyedia lahan,masyarakat, serta petugas parkir yang dilibatkan dapat meningkatkan tertib parkir liar?
Jawaban: E parking adalah parkir di tepi jalan, kalo peyedia lahan. Lahan yang penyedia masyarakat atau milik swasta itu dikenakan pajak parkir. Makanya tidak ada komunikasi antara masyarakat dengan dishub.
2. Menurut Bapak apakah sumber daya manusia (SDM) diperlukan dalam pelaksanaan e parking di kota Medan? Dan sumber daya seperti apa yang diharapkan sehingga mampu mengendalikan tertib parkir di kota Medan.
Jawaban: Kita berharap e parkirng ini dilakoni atau dijalnkan oleh jukir yang memiliki kapasitas yang ideal, kita kan tau bahwa semua orang tidak memiliki atau menginginkan cita cita sebagai tukang parkir. Tapi sdm yang kita lakukan pelatihan alat dan sisitem.
3. Apa bentuk atau usaha dinas perhubungan kota medan dalam peningkatan kualitas E-parking di kota Medan? Pengawasan dan evaluasi sisitem.
Jawaban: Evaluasi kerja Mengumpulkan data dan melakukan evaluasi kinerja sistem e-parking untuk mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan, serta untuk melakukan perbaikan yang diperlukan. Dan melakukan Pengawasan terhadap juru parkir yang tidak menggunakan alat dan yang masih menerima uang tunai.
4. Menurut Bapak bagaimanakah standar operasi dalam melaksanakan kebijakan e parking pada Dinas perhubungan?
Jawaban: SOP (Standard Operating Procedure) Dinas Perhubungan dalam melaksanakan kebijakan e-parking bertujuan untuk memastikan bahwa implementasi dan pengelolaan sistem parkir elektronik berjalan dengan efisien, konsisten, dan sesuai dengan regulasi yang berlaku.

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN *E-PARKING* PADA DINAS PERHUBUNGAN di KOTA MEDAN

A. Identitas responden

1. Nama : Mhd.Zein Lubis,ST
2. Jenis Kelamin : Laki-laki
3. Umur : 47
4. Pekerjaan : Inspektur Sub Koordinator Lingkup Parkir Khusus
5. Pendidikan : S1

B. Pertanyaan-Pertanyaan penelitian

1. Bagaimana strategi komunikasi yang diterapkan oleh Dinas Perhubungan Kota Medan dalam memastikan pelaksanaan program e-parking berjalan lancar, dan bagaimana upaya yang dilakukan untuk mendukung efektivitas program tersebut?

Jawaban: Dinas Perhubungan Kota Medan telah menerapkan strategi komunikasi yang terstruktur untuk memastikan pelaksanaan program e-parking berjalan lancar. Koordinasi dilakukan dengan membagi wilayah kota Medan menjadi dua area, mempermudah pengendalian dan supervisi petugas e-parking yang tersebar. Langkah ini menunjukkan komitmen dinas dalam menangani masalah perparkiran secara serius. Komunikasi dengan masyarakat dilakukan secara berkala melalui iklan dan pamflet di lokasi-lokasi strategis, serta arahan khusus untuk petugas e-parking agar tidak menerima pembayaran tunai.

2. Bagaimana kualitas sumber daya manusia yang terlibat dalam inisiatif E-Parking, dan permasalahan apa saja yang masih dihadapi dalam mengubah mentalitas juru parkir yang sudah lama bekerja?

Jawaban: Kualitas sumber daya manusia yang terlibat dalam program E-Parking memadai dan mampu menjalankan tanggung jawabnya untuk mendukung keberhasilan program. Permasalahan terakhir adalah mengubah sikap tukang parkir lama yang masih terbiasa menerima uang tunai.

3. Mengapa sebagian juru parkir di Kota Medan masih menolak penggunaan alat elektronik untuk pembayaran parkir, dan bagaimana hal ini memengaruhi pelaksanaan kebijakan E-parking?

Jawaban: Dinas Perhubungan Kota Medan paham betul bagaimana menjalankan undang-undang E-parking. Namun, komplikasi muncul karena beberapa juru parkir terus menolak menerima pembayaran parkir elektronik, dengan alasan bahwa pendapatan yang diperoleh lebih kecil dibandingkan dengan pendapatan yang diperoleh melalui sistem manual. Padahal, jika aturan ini dijalankan dengan benar, berpotensi mengurangi jumlah juru parkir liar sekaligus meningkatkan PAD Kota Medan. Juga mengawasi juru parkir yang tidak memanfaatkan teknologi namun tetap menerima bayaran.

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN *E-PARKING* PADA DINAS PERHUBUNGAN di KOTA MEDAN

A. Identitas responden

1. Nama : Johnson
2. Jenis Kelamin : Laki-laki
3. Umur : 57
4. Pekerjaan : Juru Parkir
5. Pendidikan : SMP

B. Pertanyaan-Pertanyaan penelitian

1. Bagaimana Dinas Perhubungan Kota Medan mengimplementasikan program e-parking, dan apa saja tantangan yang dihadapi dalam penggunaan aplikasi e-parking di lapangan?

Jawaban: Dalam menjalankan program e-parking, dinas perhubungan kota medan telah memberikan sosialisasi, petunjuk serta arahan tentang e-parking itu sendiri, mulai dari kriteria petugas parkir, tata pelaksanaan dilapangan, alat yang digunakan hingga pada proses pembayaran menggunakan sistem aplikasi e-parking. Penggunaan aplikasi e-parking ini memiliki dampak positif dan negatif ketika dijalankan, saya terkadang mendapatkan kesulitan ketika aplikasi eror dan juga masyarakat yang masih memberikan pembayaran dalam bentuk tunai, terkadang untuk mengatasi keadaan tersebut memakan waktu 10 menit.”

2. Apa kendala yang bapak hadapi sebagai juru parkir *E-parking*?

Jawaban: Kendala teknis seperti jaringan internet yang tidak stabil atau perangkat yang rusak bisa menjadi penghambat dalam pelaksanaan tugas juru parkir. Sistem yang bergantung pada teknologi sering kali rentan terhadap gangguan semacam ini.

3. Masalah apa yang bapak hadapi di masyarakat yang tidak mau menggunakan pembayaran secara non tunai?

Jawaban: Beberapa pengguna parkir mungkin merasa tidak nyaman atau enggan menggunakan sistem E-parking, terutama mereka yang kurang familiar dengan teknologi digital. Hal ini bisa menyebabkan ketegangan antara juru parkir dan pengguna. Dan memilih pembayaran secara tunai.

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN *E-PARKING* PADA DINAS PERHUBUNGAN di KOTA MEDAN

A. Identitas responden

1. Nama : M.rasiden
2. Jenis Kelamin : Laki-laki
3. Umur : 39
4. Pekerjaan : Juru Parkir
5. Pendidikan : SMP

B. Pertanyaan-Pertanyaan penelitian

1. Bagaimana pandangan Anda mengenai penerapan E-Parking di masyarakat, terutama dalam konteks kesulitan yang dihadapi oleh orang tua dalam memahami cara pembayarannya, serta kebiasaan sebagian masyarakat yang lebih nyaman menggunakan pembayaran tunai? Bagaimana Anda, sebagai juru parkir, menangani situasi ini, mengingat adanya berbagai tipe masyarakat di lapangan? Apakah Anda merasa terpaksa harus menerima pembayaran tunai meskipun sistem E-Parking sudah diterapkan?

Jawaban: Memang masih ada masyarakat yang belum memahami cara menggunakan E-Parking, terutama orang tuanya yang masih bingung cara membayarnya, dan masih ada pula masyarakat yang memahami sistem E-Parking namun lebih memilih membayar secara tunai dibandingkan non-tunai. uang tunai saat melakukan transaksi. Bagaimana pun kami juru parkir tidak bisa memaksakan secara keras dan paksa harus bayar non tunai. Kita kan tau di lapangan ini banyak tipikal masyarakat yang kita jumpai. Bisa bisa kita bermasalah dengan keadaan seperti ini. Mau tidak mau kami menerima uang secara tunai.

2. Apa kendala yang bapak hadapi sebagai juru parkir *E-parking*?

Jawaban: Juru parkir mungkin menghadapi kesulitan dalam mengoperasikan perangkat teknologi seperti aplikasi E-parking, tablet, atau sistem pemindai.

3. Masalah apa yang bapak hadapi di masyarakat yang tidak mau menggunakan pembayaran secara non tunai?

Jawaban: kurangnya pemahaman dan literasi digital di kalangan masyarakat tertentu. Banyak orang, terutama yang lebih tua mungkin merasa tidak nyaman dengan teknologi baru atau tidak memahami cara menggunakan aplikasi pembayaran non tunai.

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN *E-PARKING* PADA DINAS PERHUBUNGAN di KOTA MEDAN

A. Identitas responden

1. Nama : Prianto Pasaribu
2. Jenis Kelamin : Laki-laki
3. Umur : 35
4. Pekerjaan : Juru Parkir
5. Pendidikan : SMP

B. Pertanyaan-Pertanyaan penelitian

1. Bagaimana Dinas Perhubungan memastikan bahwa juru parkir menjalankan tugas mereka dengan efektif dan mematuhi aturan yang telah ditetapkan?

Jawaban: dinas perhubungan sangat mempercayai kami terhadap juru parkir. Karena telah bekerja sama melalui kontrak dan ada peraturan yang harus kami ikuti. Dinas perhubungan juga sering melakukan pengawasan terhadap kami secara langsung. Seperti pengawasan teknologi kamera CCTV Menggunakan kamera CCTV untuk memantau aktivitas parkir dan perilaku juru parkir secara real-time dan merekam aktivitas untuk evaluasi. Memantau transaksi, pelanggaran dan penggunaan sistem. bahwa juru parkir menjalankan tugas mereka dengan efektif, mematuhi aturan, dan memberikan layanan yang berkualitas kepada masyarakat.

2. Apakah ada pelatihan dari Dinas Perhubungan Kota Medan tentang penerapan *E-parking*?

Jawaban: instansi pemerintah seperti Dinas Perhubungan telah mengadakan sosialisasi dan pelatihan bagi petugas lapangan serta pihak terkait lainnya.

3. Apa kesulitan yang bapak hadapi dalam menerapkan sistem *E-parking*?

Jawaban: Adaptasi masyarakat terhadap teknologi baru seringkali menjadi tantangan. Masyarakat yang belum terbiasa dengan teknologi digital mungkin merasa kesulitan menggunakan sistem *E-parking*, terutama bagi mereka yang kurang familiar dengan pembayaran non-tunai atau aplikasi mobile. Edukasi dan sosialisasi yang kurang efektif bisa menyebabkan resistensi atau ketidakpatuhan masyarakat terhadap sistem ini.

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN *E-PARKING* PADA DINAS PERHUBUNGAN di KOTA MEDAN

A. Identitas responden

1. Nama : Ahmad
2. Jenis Kelamin : Laki-laki
3. Umur : 28
4. Pekerjaan : Juru Parkir
5. Pendidikan : SD

B. Pertanyaan-Pertanyaan penelitian

1. Bagaimana Dinas Perhubungan Kota Medan mengimplementasikan program e-parking?

Jawaban: Dalam pelaksanaan program e-parking, Dinas Perhubungan Kota Medan telah melakukan berbagai upaya sosialisasi, memberikan petunjuk, dan arahan terkait sistem e-parking. Hal ini mencakup penjelasan mengenai kriteria untuk petugas parkir, prosedur pelaksanaan di lapangan, peralatan yang digunakan, serta mekanisme pembayaran yang melalui aplikasi e-parking

2. Apa kendala yang bapak hadapi sebagai juru parkir *E-parking*?

Jawaban: Masalah teknis seperti ketidakstabilan jaringan internet atau kerusakan perangkat dapat menghambat pelaksanaan tugas petugas parkir. Sistem yang mengandalkan teknologi sering kali menghadapi kerentanan terhadap gangguan-gangguan seperti ini

3. Masalah apa yang bapak hadapi di masyarakat yang tidak mau menggunakan pembayaran secara non tunai?

Jawaban: Beberapa pengguna parkir mungkin merasa kurang nyaman atau enggan memanfaatkan sistem E-parking, terutama bagi mereka yang kurang terbiasa dengan teknologi digital. Situasi ini bisa menimbulkan masalah antara juru parkir dan pengguna.

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN *E-PARKING* PADA DINAS PERHUBUNGAN di KOTA MEDAN

A. Identitas responden

1. Nama : Josafat Sihombing
2. Jenis Kelamin : Laki-laki
3. Umur : 28
4. Pekerjaan : Ojek Online
5. Pendidikan : SMA

B. Pertanyaan-Pertanyaan penelitian

1. Sejauh ini, bagaimana Anda menilai efektivitas komunikasi mengenai program e-parking?

Jawaban: Sejauh ini komunikasi belum terlalu nampak ya,,informasi yang saya dapatkan dari berita dan sosial media hanyalah informasi tentang adanya program e-parking untuk titik atau wilayah parkir sendiri saya masih belum tau dimana mana saja, jelasnya ketika saya datang berbelanja atau mengunjungi tempat-tempat lainnya saya selalu membawa uang cash untuk pembayaran parkir saya.

2. Apakah ada sosialisasi tentang *E-parking* kepada masyarakat?

Jawaban: Sosialisasi mengenai cara menggunakan E-parking belum merata. Banyak orang yang belum mendapatkan informasi yang cukup tentang bagaimana sistem ini bekerja dan apa yang harus dilakukan jika mengalami masalah.

3. Bagaimana respon masyarakat terhadap penerapan sistem *E-parking* ?

Jawaban: Respon masyarakat terhadap penerapan sistem ini juga mencerminkan pandangan mereka terhadap pemerintah. Banyak yang melihat E-parking sebagai langkah positif menuju modernisasi dan peningkatan infrastruktur kota. Namun, ada juga yang berharap bahwa pemerintah akan terus meningkatkan sistem ini dengan memperhatikan masukan dari masyarakat serta memastikan solusi untuk masalah yang ada.

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN *E-PARKING* PADA DINAS PERHUBUNGAN di KOTA MEDAN

A. Identitas responden

1. Nama : Jamal
2. Jenis Kelamin : Laki-laki
3. Umur : 30
4. Pekerjaan : wiraswasta
5. Pendidikan : SMA

B. Pertanyaan-Pertanyaan penelitian

1. Bagaimana proses pembayaran parkir yang seharusnya dilakukan, dan apa yang terjadi jika masyarakat melakukan pembayaran secara tunai?

Jawaban: Kalau untuk petugas juru parkir yang dijalankan memang sudah sesuai dijalankan oleh juru parkir. Seperti pengelolaan parkir. Melakukan pembayaran secara non tunai. Dan ada juga masyarakat melakukan pembayaran secara tunai. Sebagai anggota masyarakat, saya bertanggung jawab untuk memastikan bahwa peraturan yang ada berfungsi dengan baik. Jadi, kalau ada tukang parkir yang salah memberi harga, kita harus lapor agar tidak menjadi kebiasaan. Saat memanfaatkan *E-Parking*, saya melihat banyak petugas parkir yang meminta pembayaran tunai untuk biaya parkir dibandingkan menggunakan perangkat *E-Parking*.

2. Apakah ada sosialisasi tentang *E-parking* kepada masyarakat?

Jawaban: tentang sosialisasi kepada masyarakat belum sepenuhnya merata masih banyak kalangan masyarakat tidak tau tentang sistem *E-parking* dan titik wilayah *E-Parking*

3. Bagaimana respon masyarakat terhadap penerapan sistem *E-parking* ?

Jawaban: Respon saya terhadap *E-Parking* baik selain meningkatkan PAD dan dapat meningkatkan transparansi terkait pendapatan PAD daripada pembayaran parkir secara manual atau tunai

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN *E-PARKING* PADA DINAS PERHUBUNGAN di KOTA MEDAN

A. Identitas responden

1. Nama : Vanus Gulo
2. Jenis Kelamin : Laki-laki
3. Umur : 27
4. Pekerjaan : Pelayanan Kesehatan
5. Pendidikan : D3 Keperawatan

B. Pertanyaan-Pertanyaan penelitian

1. Mengapa ada masyarakat yang masih memilih pembayaran tunai dan menolak pembayaran non-tunai? Apa alasan yang mereka ajukan terkait sistem pembayaran E-Parking?

Jawaban: Memang, ketika program E-Parking pertama kali diluncurkan, mendapat tentangan baik dari petugas parkir maupun masyarakat umum. Apa manfaat pendekatan ini setelah pemberitaan dan sosialisasi? Saya akhirnya mengerti dan menjawab dengan benar; Ada pula yang senang dengan kebijakan E-Parking ini karena mekanisme pembayarannya lebih transparan, dan uang parkir tidak masuk ke tangan swasta atau penguasa kawasan. Pembayaran e-parking ini dilakukan ke PAD Kota Medan. Namun, kami menyadari bahwa tidak semua orang memahami e-parking. Cara Menggunakannya. Banyak orang melakukan pembayaran tunai namun menolak pembayaran nontunai karena alasan yang membingungkan dan memakan waktu.

2. Apa kesulitan yang anda hadapi dalam pembayaran sistem *E-Parking*?

Jawaban: Kesulitan yang saya hadapi memang tidak ada akan tetapi saya lebih mudah membayar secara tunai dan sudah menyediakan uang tunai untuk bayar parkir selain cepat waktu sistemnya lebih mudah.

3. Bagaimana respon masyarakat terhadap penerapan sistem *E-parking* ?

Jawaban: Untuk kebijakan ini memang manfaatnya untuk masyarakat namun kita ketahui masih banyak masyarakat apatis terhadap kebijakan selain menimbulkan pro dan kontra dikalangan masyarakat karena sebagian masyarakat ada yang menerima dengan baik dan juga tidak.

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN *E-PARKING* PADA DINAS PERHUBUNGAN di KOTA MEDAN

A. Identitas responden

1. Nama : Vister
2. Jenis Kelamin : Laki-laki
3. Umur : 29
4. Pekerjaan : Wiraswasta
5. Pendidikan : S1

B. Pertanyaan-Pertanyaan penelitian

1. Apa kah bapak tau kebijakan *E-Parking*?

Jawaban: untuk kebijakan e parking saya sedikit tau Informasi di media sosial dan sering melihat masalah di media sosial tentang e juru e parking dengan juru parkir liar. dikarenakan masih Masih banyak Masyarakat yang tidak tahu Tentang e parking dan titik wilayah e parking.

2. Apakah bapak mengerti cara pembayaran *E-Parking*?

Jawaban: untuk pembayaran e parking yang saya baca di berita dan media sosial adalah pembayaran secara non tunai. melalui aplikasi. tapi saya tidak tau dan mengerti untuk membayar nya. Karena saya tidak punya aplikasi pembayaran non tunai. Karena saya hanya punya duit cash

3. Apa yang seharusnya dilakukan oleh dinas perhubungan tentang *E-Parking* kepada masyarakat?

Jawaban: untuk masyarakat seharusnya dilakukan sosialisasi secara merata terkait *E-Parking* ini. sistem dan caranya bagaimana. pembayaran nya nya bagaimana. dan apa efek dan keuntungan eparking kepada masyarakat sehingga masyarakat tau kebijakan *E-Parking* ini untuk apa. dan dimana saja titik wilayah *E-Parking*. karena saya melihat ada yang menerapkan *E-Parking* di beberapa titik saja. dan masih banyak saya melihat juru parkir liar yang masih menerima uang secara tunai

8. DOKUMENTASI PENELITIAN



Dokumentasi Wawancara di Dinas Perhubungan



Dokumentasi Wawancara dengan Bapak Kepala Bidang Lalu Lintas dan Angkutan (Ami Kholis Hasibuan,S.SiT,MT)



Dokumentasi Wawancara dengan bapak Inspektur Sub Koordinator Lingkup Parkir Khusus (Mhd.Zein Lubis,ST)



Dokumentasi Wawancara di Dinas Perhubungan



Dokumentasi di Kantor Dinas Perhubungan Kota Medan



Dokumentasi Wawancara dengan juru parkir (Bapak Prianto Pasaribu)



Dokumentasi Wawancara Dengan Juru Parkir (Bapak M.rasiden)



Dokumentasi Wawancara Dengan Juru Parkir (Bapak Johnon)



Dokumentasi Wawancara Dengan Juru Parkir (Bapak Ahmad)



Dokumentasi Wawancara Dengan Masyarakat (Bapak Josafat Sihombing)



Dokumentasi Wawancara Dengan Masyarakat (Bapak Jamal)



Dokumentasi Wawancara Dengan Masyarakat (Abang Vister)



Dokumentasi Wawancara Dengan Masyarakat (Abang Vanus Gulo)

Scan barcode E-parking



Plang himbauan pembayaran e-parking dari Dinas Perhubungan Kota Medan